

**ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM DALAM
MENJATUHKAN SANKSI PIDANA PADA KEJAHATAN NARKOTIKA
(Studi Putusan Pengadilan Negeri Polman No. 186/Pid. Sus/2016/PN.Pol)**



SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih Gelar
Sarjana Hukum (S.H) Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah Dan Hukum
Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
MAKASSAR

Oleh :

NUR AULIA SARI
NIM: 10500113229

**JURUSAN ILMU HUKUM
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN
MAKASSAR
2017**

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Nur Aulia Sari
NIM : 10500113229
Tempat/Tanggal Lahir : Pare-Pare, 06 Desember 1995
Jurusan : Ilmu Hukum
Fakultas : Syari'ah dan Hukum
Alamat : Samata, Gowa
Judul : Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan
Sanksi Pidana Pada Kejahatan Narkotika (Studi Kasus Pengadilan Negeri Polewali
No. 186/Pid.Sus/2016/PN.Pol).

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi in benar adalah hasil karya sendiri. Jika dikemudian hari terbukti bahwa ini merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R

Samata, 21 Desember 2017

NUR AULIA SARI

10500113229

SURAT PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul, "*Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Sanksi Pidana Pada Kejahatan Narkotika (Studi Kasus Pengadilan Negeri Polewali No. 186/Pid.Sus/2016/PN.Pol)*", yang disusun oleh NUR AULIA SARI, NIM : 10500113229, Mahasiswa program studi Ilmu Hukum, Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Alauddin Makassar telah dinji dan dipertahankan dalam sidang *Munqasyah* yang diselenggarakan pada hari Rabu, 6 Desember 2017 M, bertepatan dengan 17 Rabiul Awal 1439 H, dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) pada Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Alauddin Makassar dengan beberapa perbaikan.

Gowa, 6 Desember 2017

17 Rabiul Awal 1439 H

DEWAN PENGUJI

Ketua : Prof. Dr. Darussalam Syamsuddin, M.Ag (.....)

Sekretaris : Dr. H. Muh. Saleh Ridwan, M.Ag (.....)

Penguji I : Istiqamah, S.H., M.H (.....)

Penguji II : Rahman Syamsuddin, S.H., M.H (.....)

Pembimbing I : Dr. Hamsir, M.Hum (.....)

Pembimbing II : Dra. Nila Sastrawati, M.Si (.....)

Diketahui oleh:

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

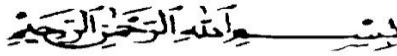
UIN Alauddin Makassar,



Prof. Dr. Darussalam Syamsuddin, M.Ag

NIP. 19621016 199003 1 003

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Rasa syukur yang sangat mendalam penyusun panjatkan kehadiran Allah swt. atas segala limpahan rahmat, hidayah, serta karunia-Nya sehingga penyusun dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan judul “Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Sanksi Pidana Pada Kejahatan Narkotika (Studi Kasus Pengadilan Negeri Polewali No. 186/Pid.Sus/2016/PN.Pol) sebagai ujian akhir program Studi di Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. Shalawat serta salam semoga selalu tercurah pada baginda Nabi Muhammad saw. yang menjadi penuntun bagi umat Islam.

Saya menyadari bahwa, tidaklah mudah untuk menyelesaikan skripsi ini tanpa bantuan dan doa dari berbagai pihak. Penyusun mengucapkan terima kasih yang teristimewa untuk orang tua saya Ibunda Hj. Nurhaeda , dan Ayah saya H. Abd. Rasyid Pendi, S.Pdi , yang tak henti-hentinya mendoakan, memberikan dorongan moril dan materil, mendidik dan membesarkan saya dengan penuh cinta kasih sayang, dan yang selalu memberikan semangat dan perhatiannya dalam pembuatan skripsi ini.

1. Bapak Prof. Dr. Musafir Pababbari, M.Si, selaku Rektor UIN Alauddin Makassar
2. Bapak Prof. Dr. Darussalam Syamsuddin, M.Ag, selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum, Bapak Dr. H. Abd. Halim Talli, M.Ag, selaku Wakil Dekan bidang Akademik dan pengembangan lembaga, Bapak Dr. Hamsir, SH., M.Hum, selaku Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum dan Keuangan, Dr. H. M. Saleh Ridwan,

M.Ag, selaku Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Segenap Pegawai Fakultas yang telah memberikan bantuan dalam penyelesaian skripsi ini.


3. Teruntuk Ibu Istiqamah, SH., MH. dan Bapak Rahman Syamsuddin, SH., MH. selaku Ketua dan Sekertaris Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar yang selalu memberikan bimbingan, dukungan, nasehat, motivasi demi kemajuan penyusun.
4. Teruntuk Ibu Dra. Nila Sastrawati, M.Si. dan Bapak Dr. Hamsir, M.Hum Selaku pembimbing skripsi yang telah sabar memberikan bimbingan, dukungan, nasihat, motivasi demi kemajuan penyusun.
5. Teruntuk Seluruh Bapak dan Ibu Dosen serta jajaran Staf Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar terkhusus yang telah memberikan ilmu, membimbing penyusun dan membantu kelancaran sehingga dapat menjadi bekal bagi penyusun dalam penulisan skripsi ini dan semoga penyusun dapat amalkan dalam kehidupan di masa depan.
6. Kepada Ketua Pengadilan Negeri Polewali Polewali Mandar yang telah memberikan kesempatan kepada penyusun untuk melakukan penelitian, serta ucapan Terima Kasih kepada Masyarakat yang telah berpartisipasi dalam menyelesaikan penelitian.
7. Kepada sahabat-sahabat saya yang selalu memberikan motivasi dan dukungan kepada saya dalam pembuatana skripsi ini.
8. Teman-teman seperjuangan di Jurusan Ilmu Hukum terkhusus Angkatan 2013 “Ilmu Hukum E” Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar

9. Semua Pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah memberikan bantuannya bagi penyusun dalam penyusunan penulisan skripsi ini baik secara materil maupun formil.

Penyusun menyadari bahwa tidak ada karya manusia yang sempurna di dunia ini. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati penyusun menerima kritik dan saran yang membangun sehingga dapat memperbaiki semua kekurangan yang ada dalam penulisan hukum ini. Semoga penulisan hukum ini dapat bermanfaat bagi siapapun yang membacanya. *Amin Yaa Rabbal Alamin.*

Samata, 23 November 2017

Penyusun,



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R

Nur Aulia Sari
NIM: 10500113229

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN JUDUL.....	
PENGESAHAN UJIAN SKRIPSI.....	
KATA PENGANTAR	
DAFTAR ISI.....	
ABSTRAK	
BAB I. PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Deskripsi Fokus dan Fokus Penelitian	
C. Rumusan Masalah.....	10
D. Kajian Pustaka	
E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	11
BAB II. TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA BERPIKIR.....	13
A. Pengertian Narkotika	16
B. Jenis-Jenis Narkotika	20
C. Ketentuan-Ketentuan Mengenai Kejahatan narkotika dalam Sistem Perundang-Undangan	28
D. Teori-Teori Pidana.....	24
E. Efektivitas Penegakan Sanksi Pidana pada Kejahatan Narkotika	28
BAB III. METODE PENELITIAN	31
A. Jenis dan Lokasi Penelitian	31
B. Pendekatan Penelitian	32
C. Jenis dan Sumber Data	32
D. Teknik Pengumpulan Data.....	33
E. Teknik Analisis Data.....	34

BAB IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	35
A. Penerapan sanksi pidana bagi pelaku kejahatan narkoba di Pengadilan Negeri Polewali.....	35
B. Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana pada kejahatan penyalahgunaan narkoba di Pengadilan Negeri Polewali	37
C. Analisis Penulis	50
BAB V. KESIMPULAN DAN SARAN	58
A. Kesimpulan	58
B. Implikasi penelitian	59
DAFTAR PUSTAKA	62
LAMPIRAN	
RIWAYAT HIDUP	



ABSTRAK

NAMA : NUR AULIA SARI
NIM : 10500113229
JURUSAN : ILMU HUKUM
FAKULTAS : SYARI'AH & HUKUM
JUDUL : ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN SANKSI PIDANA PADA KEJAHATAN NARKOTIKA (Studi Putusan Pengadilan Negeri Polman No. 186/Pid. Sus/2016/PN.Pol)

Penelitian ini difokuskan pada pengungkapan secara deskriptif-analisis mengenai: (1) aturan hukum tentang sanksi bagi pelaku narkoba; dan (2) pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana pada kejahatan penyalahgunaan narkoba di Pengadilan Negeri Polewali.

Jenis penelitian adalah gabungan penelitian hukum normatif dan empiris. Pendekatan penelitian adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan sosiologis. Sumber data adalah data primer dan data sekunder. Data dikumpulkan melalui wawancara dan studi dokumentasi. Data yang terkumpul kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan sanksi bagi pelaku kejahatan narkoba sebagaimana diatur dalam undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, oleh majelis hakim dijatuhkan sanksi selama 1 (satu) tahun dan 1 (satu) bulan penjara dengan pertimbangan bahwa: perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat; perbuatannya bertentangan dengan program pemerintah yang tengah giat-giatnya memberantas narkoba; dan terdakwa sudah pernah dihukum.

Implikasi penilaian adalah perlu ada pedoman penindasan khusus yang memenuhi skala prioritas tentang narkoba sebagai pedoman pemidanaan mengenai pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana kepada terdakwa, karena KUHP belum cukup menjadi pedoman pemidanaan bagi hakim, di mana hakim sebagai penegak hukum yang berwenang mengadili hanya mempertimbangkan faktor-faktor yang ada di lapangan pada saat persidangan; dan dalam mempertimbangkan faktor berat-ringannya putusan pidana pada kasus kejahatan narkoba, sebaiknya hakim tidak hanya melakukan pertimbangan pada saat proses persidangan berlangsung, tetapi hendaknya juga di luar proses persidangan.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dewasa ini bangsa Indonesia sedang giat melaksanakan pembangunan. Adanya pertumbuhan dan kemajuan perkembangan kehidupan masyarakat yang begitu cepat sebagai hasil dan proses dari pelaksanaan pembangunan di segala bidang kehidupan sosial, politik, ekonomi, keamanan dan budaya telah membawa pula dampak negatif berupa peningkatan kualitas dan kuantitas berbagai macam kejahatan yang sangat merugikan dan meresahkan masyarakat.

Menurut I Made Darma Weda bahwa peningkatan berbagai macam kejahatan tersebut merupakan kenyataan zaman yang tidak dapat dihindari, dan kejahatan merupakan persoalan yang dialami manusia dari waktu ke waktu.¹ Oleh karena itu dimana ada manusia di sana potensial terjadi kejahatan.

Hakim, Jaksa, Polisi dan Pengacara adalah mereka yang langsung maupun tidak langsung terlibat dalam proses penegakan hukum. Penegakan hukum tersebut menyasikan antara nilai, kaidah dan perilaku, misalnya nilai-nilai kepastian hukum dengan kesebandingan hukum, penegakan hukum tersebut berkisar dari menindak dan memelihara kedamaian yang bertujuan keadilan.²

¹ I Made Darma Weda, *Kriminologi*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1999), h. 11.

² Soerjono Soekanto, *Sendi-Sendi Ilmu Hukum*. Bandung: PT. Cipta Aditya Bhakti, 1993), h.

Oleh karena itu hukum sebagai sarana untuk menciptakan ketertiban dan keadilan harus lebih ditingkatkan, karena tanpa ketertiban dan kepastian hukum kehidupan masyarakat yang teratur tidak mungkin terselenggara.³ Menurut Reckless, bahwa seorang ahli hukum asal New York Amerika Serikat menyatakan bahwa baik buruknya situasi kamtibmas suatu negara paling tidak dipengaruhi oleh 5 hal, yaitu :

1. Bagaimana sistem dan organisasi kepolisiannya.
2. Bagaimana sistem hukumnya.
3. Bagaimana peradilanannya.
4. Bagaimana sistem birokratif dalam membina kamtibmas dan penegakan hukumnya.
5. Bagaimana partisipasi masyarakat.⁴

Meskipun acuan pakar tersebut sudah lebih dari tiga dekade, namun masih cukup aktual untuk bahan analisis dikorelasikan dengan sistem keadilan hukum di Indonesia sekarang, terutama dalam meningkatkan sanksi bagi pelaku. Oleh karena itu penegakan hukum dilaksanakan secara tegas dan lugas tetapi manusiawi didasari asas kemanfaatan, keadilan dan kepastian hukum dalam rangka mewujudkan tujuan hukum.

Hukum sebagai perlindungan kepentingan manusia harus dilaksanakan. Dalam hal terjadi pelanggaran hukum atau sengketa, pelaksanaan atau penegakan hukum itu diserahkan pada penguasa, dalam hal ini kekuasaan kehakiman. Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (1) UU. No. 48 Tahun 2009 Tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999 tentang Pokok- Kekuasaan Kehakiman

³ Satjipto Raharjo, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum* (Jakarta: PT. Raja Grafindi Persada, 1991), h. 23.

⁴ Lili Tjahjadi, *Hukum Moral* (Jakarta: Kanisius, 1991), h. 52.

disebutkan bahwa: “Kekuasaan Kehakiman adalah Kekuasaan Negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia”.⁵

Kekuasaan kehakiman pada hakekatnya adalah bebas. Tugas pokok kekuasaan kehakiman ialah menerima, memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan setiap perkara yang diajukan. Dalam mengadili dan menyelesaikan setiap perkara kekuasaan kehakiman harus bebas, bebas untuk mengadili dan bebas dari pengaruh apa atau siapapun. Sudah menjadi sifat pembawaan kekuasaan kehakiman bahwa kekuasaan kehakiman itu bebas, baik di Amerika Serikat, Belanda, Perancis maupun di Indonesia. Kekuasaan kehakiman pada dasarnya adalah bebas, tetapi kebebasan itu tidaklah mutlak sifatnya. Kebebasan itu dipengaruhi oleh sistem pemerintahan, politik, ekonomi dan sebagainya.

Di Indonesia, tugas hakim adalah untuk menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dengan jalan menafsirkan hukum dan mencari dasar-dasar serta asas-asas yang jadi landasannya, melalui perkara-perkara yang dihadapkan kepadanya sehingga putusan itu mencerminkan perasaan keadilan masyarakat. Putusan hakim tidak boleh menyimpang dari Pancasila atau bertentangan dengan ketentuan yang tercantum dalam Undang-Undang dasar 1945 bahwa “Negara Indonesia adalah Negara hukum.”⁶

⁵ Pasal 1 ayat (1) UU. No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

⁶ Pasal 1 ayat (3) UUD 1945.

Apabila hakim menjalankan tugasnya secara baik dengan penuh tanggung jawab, penuh dedikasi dan kreasi berarti hakim ikut serta dalam pembangunan hukum.⁷ Penuh tanggung jawab dan dedikasi berarti memahami, mendalami dan menyadari apa yang menjadi tugasnya dan apa yang diharapkan dari padanya serta menjalankannya. Tugas hakim tidak semata-mata hanya merupakan sesuatu yang rutin dan bersifat mekanis saja, tetapi hakim harus dapat melihat, memahami dan mendalami perkembangan dan menghayati jiwa masyarakat. Untuk itu kiranya perlu kemampuan kreatif dari hakim.⁸

Tugas pokok dari hakim adalah menerima, memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya. Tampaknya sangat sederhana tugas hakim seperti yang dimaksud dalam Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, tetapi dalam kenyataannya tidaklah mudah dan sesederhana itu. Pada hakekatnya dari seorang hakim diharapkan memberi pertimbangan tentang salah tidaknya seseorang dan benar tidaknya peristiwa yang disengketakan dan kemudian menerapkan atau menentukan hukumnya.

Hakim sebagai penegak hukum dan keadilan wajib menggali dan memahami hukum yang hidup dalam masyarakat. Hal tersebut agar hakim dapat memberikan keputusan yang sesuai dengan hukum dan rasa keadilan masyarakat. Dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, hakim wajib memperhatikan pula sifat-

⁷ G. Karta Saputra, *Pengantar Ilmu Hukum*. (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 1982), h. 34.

⁸ G. Karta Saputra, *Pengantar Ilmu Hukum*, h.36.

sifat yang baik dan jahat dari terdakwa. Hal ini perlu dipertimbangkan karena keadaan-keadaan pribadi seseorang perlu diperhitungkan untuk menjatuhkan pidana yang setimpal dan seadil-adilnya. Keadaan pribadi tersebut dapat diperoleh dari keterangan saksi atau orang-orang dari lingkungannya, dokter ahli dan sebagainya.⁹

Narkotika adalah zat yang berkhasiat dan sangat dibutuhkan bagi kepentingan umat manusia, terutama dari sudut medis. Namun disisi lain, justru sifat dan khasiat yang berharga dalam dunia pengobatan menimbulkan efek lain yang dapat disalahgunakan orang untuk memakainya secara terus menerus dan diluar ketentuan undang-undang serta kepentingan pengobatan, yakni penyalahgunaan beserta berbagai akibatnya. Maka masalah utama narkotika adalah di suatu pihak diperlukan (untuk medis dan ilmu pengetahuan) di pihak lain harus diberantas karena disalah-gunakan. Sementara itu ada orang-orang atau organisasi-organisasi ilegal yang bergerak di bidang peredaran gelap narkotika dengan berbagai motivasi dari sekedar mencari nafkah, mengeruk uang sebanyak-banyaknya sampai pada tujuan subversi untuk melumpuhkan suatu Negara.¹⁰

Penyalahgunaan narkotika sangatlah berbahaya, karena disamping akan membawa pengaruh terhadap diri pemakainya dimana ia akan kecanduan dan hidupnya tergantung pada zat-zat narkotika, jika tidak tercegah (terobati), maka narkotika yang digunakan akan semakin kuat dan bertambah dosisnya. Dan bila ini terjadi maka si

⁹ Satjipto Raharjo, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, h. 38.

¹⁰ Soedjono Drdjosisworo, *Hukum Narkotika Indonesia* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1990), h. 55.

pecandu untuk memenuhi kebutuhannya, akan berbuat apa saja untuk memenuhi kebutuhannya dan tidak mustahil akan melakukan tindakan-tindakan kejahatan. Hal ini sebagaimana Andi Hamzah mengatakan bahwa narkoba dapat merusak bukan saja bagi orang yang diinggapi penyakit itu, tetapi juga orang sekitar dalam masyarakat. Akibatnya yang fatal dapat merusak tatanan kehidupan sosial, budaya, agama dan ekonomi bahkan dapat pula menjadi penyebab kejahatan dan penyakit sosial lainnya.¹¹

Penyalahgunaan narkoba atau istilah lainnya penyalahgunaan obat (*drug Abuse*) dalam dua tiga dekade terakhir sangat memprihatinkan. Secara global dan sudah mencapai keadaan serius di Indonesia. Penyalahgunaan dimaksud bila suatu obat digunakan dengan sengaja untuk mencari atau mencapai kesadaran tertentu karena pengaruh obat pada jiwa.

Dari segi hukum obat-obat yang sering disalahgunakan dapat dibagi dalam dua kelompok, yaitu narkoba atau obat bius dan psikotropika. Namun psikotropika tidak termasuk dalam pembahasan ini. Pada hakekatnya masalah penyalahgunaan narkoba bukan masalah yang berdiri sendiri. Melainkan mempunyai sangkut paut dengan faktor-faktor lain yang timbul dalam kehidupan manusia. Itulah sebabnya masalah ini sering disebut sebagai gejala sosial yang pada akhir-akhir ini menonjol terutama di kota-kota besar dan kota Watampone tak terkecuali.

Menurut Adnan Hasan Baharits, bahwa:

¹¹ Andi Hamzah, *Delik-Delik Tersebar di Luar KUHP dan Komentarnya* (Bandung: Pradnya Paramita, 1997), h. 72.

“Indonesia memiliki derajat ancaman yang serius terhadap bahaya kejahatan narkoba karena dipengaruhi oleh faktor instrumen “hukum” yang mengatur tentang kejahatan narkoba di Indonesia masih lemah dibanding negara-negara lain. Faktor lain ialah posisi Indonesia yang sangat dekat dengan sumber opium gelap dunia, yaitu kawasan Segi Tiga Emas (wilayah antara perbatasan Thailand, Laos dan Myanmar) dan kawasan Bulan Sabit Emas (wilayah diantara perbatasan Pakistan, Iran dan Afganistan)”.¹²

Masalah penjatuhan sanksi bagi pelaku narkoba seharusnya dijatuhkan sanksi yang berat agar menjadi pelajaran dan memberikan efek jera terhadap pelaku agar tidak melakukan perbuatan yang serupa di masa yang akan datang. Keputusan yang telah dijatuhkan oleh majelis hakim Pengadilan Negeri Polewali berdasarkan putusan nomor: 186/Pid.Sus/2016/Pol terlalu ringan yaitu hanya 1 (satu) tahun dan 1 (satu) bulan penjara. Hal ini dinilai sangat jauh dari ketentuan dalam Pasal 127 ayat 1 poin a yang berbunyi: Setiap pelaku penyalahguna narkoba Golongan I bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun.

Berdasarkan permasalahan yang telah dikemukakan di atas, dimana pemerintah Indonesia telah menyatakan bahwa “Indonesia adalah darurat narkoba” maka hukuman yang seberat-beratnya sebagaimana disebutkan pada Bab XV Ketentuan Pidana Pasal 111 sampai dengan Pasal 127 Undang-undang nomor 35 tahun 2009 mestinya dijatuhkan kepada para pelaku, terutama yang melakukan pelanggaran yang termasuk ke dalam kategori pelanggaran golongan I.

Fakta menunjukkan bahwa putusan majelis hakim yang telah menjatuhkan hukuman terdapat terdakwa berdasarkan putusan nomor 186/Pid.Sus/2016/PN Pol

¹² Adnan Hasan Baharits, *Bahaya Obat Terlarang Terhadap Anak Kita* (Jakarta: Gema Insani, 1998), h. 33.

selama 1 (satu) tahun dan 1 (satu) bulan penjara, menurut hemat penulis adalah hukuman yang sangat ringan dan tidak memberikan efek jela terhadap pelaku. Oleh karena itu, pertimbangan bagi majelis hakim untuk menjatuhkan sanksi pidana sebagaimana tersebut di atas menarik untuk diteliti, terutama mengenai dasar pertimbangannya.

B. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus

Dalam mendefinisikan dan memahami penelitian ini agar tidak terjadi kesalahpahaman maka penulis akan mendeskripsikan pengertian judul yang dianggap penting:

1. *Faktor pertimbangan hakim*; adalah segala hal yang terkait dengan kejahatan narkoba yang dijadikan dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan/sanksi pidana.
2. *Sanksi pidana*; adalah putusan atau vonis yang dijatuhkan oleh majelis pengadilan kepada pelaku kejahatan narkoba.
3. *Narkotika*; adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintesis maupun semi sintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini atau yang kemudian ditetapkan dengan keputusan Menteri Kesehatan.¹³

¹³Republik Indonesia, “Undang-undang RI No.35 Tahun 2009 Pasal 1 ayat (1) Tentang Narkotika.”

4. *Pelaku kejahatan narkoba*; ialah seseorang atau sekelompok orang yang dengan sengaja mengonsumsi obat-obatan terlarang jenis narkoba secara melawan hukum.
5. *Tindak pidana kejahatan narkoba*; adalah segala macam pelanggaran hukum berupa penggunaan obat-obat terlarang jenis narkoba yang penggunaannya melanggar hukum atau tidak sesuai dengan peruntukannya.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan pada latar belakang di atas, maka dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana penerapan sanksi pidana bagi pelaku kejahatan narkoba di Pengadilan Negeri Polewali?.
2. Bagaimana pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana pada kejahatan penyalahgunaan narkoba di Pengadilan Negeri Polewali.?

D. Kajian Pustaka

Secara umum, kajian pustaka atau penelitian terdahulu merupakan momentum bagi calon peneliti untuk mendemonstrasikan hasil bacaannya yang ekstensif terhadap literatur-literatur yang berkaitan dengan pokok masalah yang diteliti. Hal ini dimaksudkan agar calon peneliti mampu mengidentifikasi kemungkinan signifikansi dan kontribusi akademik dari penelitiannya pada konteks waktu dan tempat tertentu.¹⁴ Agar nantinya pembahasan ini lebih fokus pada pokok kajian maka

¹⁴UIN Alauddin Makassar, *Pedoman Penulisan Karya Tulis Ilmiah: Makalah, Skripsi, Tesis, Disertasi dan Laporan Penelitian* (Makassar: Alauddin Pers, 2013), h.13.

dilengkapi beberapa literatur yang masih berkaitan dengan pembahasan yang dimaksud diantaranya adalah sebagai berikut :

1. Moh. Taufik Makarao, Suharsil dan Moh. Zakky dalam bukunya *Tindak Pidana Narkotika*. Dalam buku ini dibahas tentang bentuk tindak pidana narkotika dimana bentuk tindak pidana narkotika yang umum dikenal ada tiga yaitu penyalahgunaan/melebihi dosis, pengedaran narkotika dan jual jual beli narkotika. Selain itu juga membahas tentang mekanisme penyelesaian tindak pidana narkotika dimana penyelesaian perkara-perkara narkotika harus didahulukan dari perkara-perkara lain untuk diajukan ke pengadilan guna mendapatkan pemeriksaan dan penyelesaian dalam waktu yang singkat, sesuai dengan semangat yang tertera dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tersebut, yakni dalam pasal 112 Sedangkan mekanisme dari penyelesaian suatu perkara narkotika harus diselesaikan menurut ketentuan acara pidana yang diatur dalam KUHP.
2. Siswantoro Sunarso dalam bukunya *Penegakan Hukum Psikotropika Dalam Kajian Sosiologi Hukum*, yang membahas tentang metode penegakan hukum yang komprehensif dengan melakukan kajian terhadap peranan penegak hukum dan peran serta masyarakat sebagai fundamental yang kokoh dalam menghadapi perkembangan penyalahgunaan narkotika dan psikotropika.
3. Y. Bambang Mulyono dalam bukunya *Pendekatan Analisis Kenakalan Remaja dan Penanggulangannya*, membahas tentang faktor paling mendasar yang

menyebabkan seorang anak melakukan perbuatan *kortsluiking* yaitu perbuatan yang merugikan dan membahayakan diri maupun lingkungan.

E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan penelitian.

Berdasarkan permasalahan di atas, maka penelitian ini bertujuan untuk:

- a. Mengetahui dan mendeskripsikan aturan-aturan hukum tentang sanksi bagi pelaku narkoba.
- b. Mengetahui dan mendeskripsikan pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana pada kejahatan penyalahgunaan narkoba di Pengadilan Negeri Polewali Mandar.

2. Kegunaan penelitian.

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat terutama bagi:

1. Bagi Institusi UIN Alauddin Makassar.

Menambah koleksi karya ilmiah yang dapat dijadikan sebagai literatur bagi mahasiswa ataupun dosen yang ingin mengadakan penelitian serupa, pada lokasi berbeda dalam ruang lingkup yang lebih luas lagi.

2. Bagi Masyarakat Umum/Pembaca.

Memberikan informasi khususnya mengenai faktor-faktor yang menjadi pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pidana pada kejahatan narkoba

serta kendala-kendala yang dihadapi hakim dalam menjatuhkan putusan pidana pada kejahatan narkoba di Pengadilan Negeri Polewali Mandar.

4. Bagi Pemerintah/Institusi Terkait.

Penelitian ini menjadi sumbangsi pemikiran dalam menangani masalah narkoba, serta memberikan fasilitas yang memadai bagi pihak terkait agar lebih optimal dalam melaksanakan peranannya.



BAB II TINJAUAN TEORITIS

A. Pengertian Narkotika

Narkotika berasal dari kata “*Narke*” dalam bahasa Yunani yang artinya “*terbius*” sehingga tidak dapat merasakan apa-apa. Perkataan narkotika ini sering disebut dengan istilah “*drugs*” yang semula diartikan sebagai “jamu” yang terbuat dari bahan tumbuhan yang dikeringkan lebih dahulu. Istilah drugs tersebut lalu diperluas artinya menjadi racun atau obat yang menimbulkan pengaruh-pengaruh tertentu bagi si pemakai, seperti menenangkan syaraf, menimbulkan rasa halusinasi, menimbulkan rasa nyeri, dan sebagainya.¹⁵

Salah satu akibat yang ditimbulkan oleh penggunaan narkotika adalah timbulnya suatu keadaan di mana si pemakainya menjadi lupa atau tidak sadarkan diri di bawah pengaruh narkotika, sehingga seseorang dapat melepaskan diri situasi konflik. Seseorang akan melarikan diri dari situasi yang tidak dapat diatasinya. Akan tetapi sebab dari kesulitan itu sama sekali tidak dapat dihilangkan. Persoalannya tetaplah utuh tak terpecahkan.

Penggunaan narkotika semacam ini malah kerap kali memperlebar ketegangan antara orang tersebut dengan masyarakatnya karena dia semakin tidak bisa menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Akibatnya, orang tersebut akan semakin menjadi besar ketergantungannya terhadap narkotika.¹⁶ Tidak ada yang tahu secara

¹⁵ Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana* (Bandung: Alumni, 1981), h. 36.

¹⁶ Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, h. 38.

pasti sejak kapan manusia mulai menggunakan narkoba. Barangkali sejak mulainya peradaban itu sendiri. Yang dimaksud dengan menggunakan narkoba di sini adalah menggunakan secara tidak benar, yaitu untuk kenikmatan yang tidak sesuai dengan pola kebudayaan manusia yang normal. Penggunaan narkoba dalam dunia medis tidak termasuk dalam pembahasan ini.

Penyalahgunaan penggunaan narkoba oleh seseorang dapat menjadikan orang tersebut tergantung (*adictie*) pada narkoba. Ketergantungan seseorang terhadap narkoba dapat ringan dan dapat pula berat. Berat-ringannya ketergantungan itu bisa diukur dari kenyataan sampai seberapa jauh seseorang bisa melepaskan diri dari penggunaan narkoba itu. Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba memberikan definisi narkoba sebagai berikut:

“Narkoba adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semi sintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini atau yang kemudian ditetapkan dengan Keputusan Menteri Kesehatan”.

Pemberian arti narkoba dalam pembahasan ini dimaksudkan untuk memberikan batasan-batasan dalam pemidanaan terhadap perbuatan-perbuatan yang diancam pidana dalam undang-undang narkoba tersebut, karena di dalam undang-

undang narkotika terdapat suatu penggolongan mengenai jenis-jenis narkotika.

Definisi yang diberikan Pasal 1 poin 1 di atas merupakan definisi yuridis narkotika.



B. Jenis-Jenis Narkotika

Sebagaimana telah disebutkan bahwa narkotika adalah atribut umum yang dikenakan pada jenis-jenis bahan atau barang tertentu yang dapat menimbulkan efek-efek tertentu bagi sipemakainya. Seperti menghilangkan rasa nyeri dan menimbulkan halusinasi. Dalam pembahasan ini hanya akan diuraikan beberapa jenis narkotika yaitu Opium, Ganja, Morfin, Kokain dan Heroin.

1. Opium.

Opium atau yang sering disebut dengan istilah candu atau madat (*opium poppy*) adalah getah kering pahit berwarna coklat kekuning-kuningan diambil dari buah *papaver somniferum* yang belum matang kemudian dipetik dan dikeringkan. Getah kering tersebut mempunyai daya memabukkan dan membius, dapat mengurangi rasa nyeri, merangsang rasa ngantuk, serta menimbulkan rasa ketagihan bagi si pemakainya. Cara penggunaannya adalah dengan mengisapnya memakai pipa.

Opium atau candu ini pernah tercatat dalam sejarah yang dikenal dengan nama “perang candu” atau “*the opium war*” yang digunakan oleh Inggris sebagai alat subversi yang menghancurkan Tiongkok pada tahun 1839-1842, perang ini kemudian ini kemudian dimenangkan oleh Bangsa Inggris setelah berhasil menghancurkan mental lawan dengan menggunakan opium atau candu.¹⁷

¹⁷ Dadang Hawari, *Al-Qur'an: Ilmu Kedokteran Jiwa dan Kesehatan Jiwa* (Jakarta: PT. Dana Bhakti Prima Yasa, 1997), h. 45.

2. Morfin.

Morfin adalah sejenis obat yang berasal dari penyulingan sari bunga *Papaver Somniferum*. Hasil penyulingan itu adalah sepuluh porsi sari buah menjadi sari porsi morfin (10 : 1). Istilah morfin diambil dari dewa mimpi Yunani yaitu *Morfius*. Morfin menjadi mengumpul rasa nyeri, memabukkan dan melenakan. Morfin membuat pemakainya serasa bermimpi-mimpi, yang kebanyakan cara pemakaiannya dengan jalan menyuntikkan ke dalam tubuh. Morfin berbentuk tepung licin dan halus keputih-putihan atau warnanya kuning pucat. Ada yang bentuknya potongan segi empat dengan berat kira-kira 0,3 gram. Melalui kaca pembesar terlihat bahwa morfin berbentuk seperti Kristal.¹⁸

3. Heroin.

Heroin adalah bubuk putih atau coklat yang berasal dari sari kimiawi bunga *papaver somniferum*. Pengaruh heroin jauh lebih besar dari pada morfin. Pemakaiannya sering dilakukan dengan cara menghirup atau disuntikkan langsung pada aliran darah. Efek yang ditimbulkan mula-mula dirasakan seperti kilat dan kemudian lenyap. Suasana di sekelilingnya terasa suram dan perasaan ngantuk selama tiga jam. Akibat dari perasaan ngantuk yang berlebihan tersebut, apabila tidak tersedia pertolongan maka si pemakai dapat meninggal dunia. Bahkan jika seseorang menggunakannya secara berlebihan atau melampaui dosis, ia dapat meninggal dunia seketika.

¹⁸ Dadang Hawari, *Al-Qur'an: Ilmu Kedokteran Jiwa dan Kesehatan Jiwa*, h. 46.

Heroin mempunyai kegunaan medis sebagai pembius untuk operasi dan dalam keadaan tertentu dapat digunakan sebagai obat batuk. Heroin bermacam-macam kadarnya, ada yang nomor tiga dan ada pula yang nomor empat. Tanda-tanda orang yang menggunakan heroin adalah matanya mengecil, biasanya mereka yang akan menggunakan heroin membutuhkan tempat aman dan tersembunyi. Seperti malam hari atau di dalam kamar mandi yang dimaksudkan agar penyuntikan yang dilakukan dapat seiring dengan denyut nadi si pemakainya.¹⁹

4. Kokain.

Kokain adalah zat dari daun koka yang dipakai sebagai obat perangsang atau obat bius. Koka adalah pohon yang umumnya terdapat di Amerika Selatan. Kokain dalam kadar tertentu dapat digunakan sebagai bahan untuk campuran pasta gigi. Kokain berwarna kristal putih atau puder putih, yang cara penggunaannya dengan injeksi yang sering pula dicampur dengan heroin.

Efek penggunaan kokain hampir sama dengan efek yang ditimbulkan oleh *amphetamine*, yaitu mabuk yang ditandai dengan perasaan terhibur, *self confidence* energi dan kekuatan. Sering perasaan-perasaan ini diiringi dengan perasaan gugup atau seolah-olah ada sesuatu yang tersumbat atau tidak tenang, dan efek yang ditimbulkan oleh kokain relatif lebih sebentar dan sering pula disertai dengan defresi hebat atau kecemasan yang luar biasa.²⁰

¹⁹ Dadang Hawari, *Penyalahgunaan narkotika dan Zat Adiktif* (Jakarta: FKUI, 1991), h. 71.

²⁰ Dadang Hawari, *Penyalahgunaan narkotika dan Zat Adiktif*, h. 72.

5. Mariyuana dan Ganja.

Ganja atau sering pula disebut dengan mariyuana, karena berasal dari rumpun yang sama yaitu tumbuhan tumbuhan yang disebut sebagai *cannabiscavita*. Mariyuana adalah tumbuhan semak yang daunnya mengandung zat yang memabukkan dan membuat orang terlena. Sedangkan ganja adalah rumpun perdu yang daunnya memabukkan dan sering dijadikan sebagai ramuan tembakau untuk rokok.²¹

Mariyuana yang sudah jadi bentuknya seperti zat yang mirip dengan tanah kasar, yang merupakan oregano, warnanya biru gelap. Mariyuana umumnya digunakan oleh kaum remaja. Pengaruh mariyuana atau ganja, pemakainya benar-benar rileks dan merasa tidak terganggu. Efeknya sama dengan alkohol, yang konsentrasi pemikiran pemakainya agak kacau dan sering kehilangan kesadaran. Semenit baginya adalah setengah jam, sesuatu yang dekat tampak jauh sekali, warna-warna kelihatan lebih terang dan suara terdengar lebih keras.

Bagian-bagian yang digunakan oleh mariyuana adalah tangkai yang sudah berkembang atau daun. Bagian ini setelah kering disuling untuk mendapatkan getah ganja. Bagian-bagian seperti akar, biji dan batang tidak terlalu banyak dipergunakan karena sedikit kandungan harsanya. Bagian khas dari tanaman ganja adalah daunnya yang mempunyai tingkat helai-helai berjumlah antara 5,7 selalu jatuh pada bilangan

²¹ Dadang Hawari, *Penyalahgunaan narkotika dan Zat Adiktif*, h. 73.

ganjil. Helai-helai tersebut berbentuk memanjang dan pinggirnya bergerigi ujungnya agar lancip dengan ukuran besar.²²

Apabila pengaruh narkoba mulai melemah, orang yang menggunakannya menjadi ngantuk dan menunjukkan tanda-tanda marah atau gugup. Suatu cirri yang dapat dikenali oleh orang habis mabuk ganja adalah matanya sedikit lebih memerah.

C. *Ketentuan-Ketentuan Mengenai Kejahatan Narkoba Dalam Sistem Perundang-Undangan*

Kejahatan narkoba diatur dalam undang-undang di luar KUHP yakni Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 merupakan perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 dan menggantikan kedudukan *staatblad* 1927-278.²³ Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 terdiri dari 15 bab dan 104 pasal yang merupakan pengaturan dan pengendalian serta penanggulangan penyalahgunaan narkoba, termasuk pengobatan dan rehabilitasi korban. Hal tersebut dijabarkan dalam butir-butir sebagai berikut:

1. Ketentuan umum;
2. Ruang lingkup dan tujuan;
3. Pengadaan dan peredaran;
4. Inpor dan ekspor;
5. Label dan publikasi;
6. Pengobatan dan rehabilitasi;

²² Hawari, Dadang, *Pendekatan Psikiatri Klinis pada Penyalahgunaan Zat* (Jakarta: Pascasarjana UI, 1990), h. 45.

²³ Soedjono Drdjosisworo, *Hukum Narkoba Indonesia* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1990), h. 65.

7. Pembinaan dan pengawasan;
8. Peran serta masyarakat;
9. Pemusnahan;
10. Penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan;
11. Ketentuan pidana; dan
12. Ketentuan-ketentuan lain, ketentuan peralihan dan penutup.²⁴

Ruang lingkup ketentuan yang terdapat dalam undang-undang baru ini, yaitu digambarkan sebagai berikut:

1. Adanya sanksi pidana yang berat dan bersifat kumulatif terhadap para pelaku kejahatan narkoba. Dengan adanya ancaman pidana yang berat ini, diharapkan agar semua orang akan takut untuk menyalahgunakan narkoba tersebut.
2. Perkara narkoba termasuk perkara yang didahulukan dari perkara lainnya untuk diajukan ke sidang pengadilan.
3. Adanya pemberian ganjaran atau premi kepada mereka yang telah berjasa dalam mengungkapkan kejahatan yang berhubungan dengan kasus narkoba. Dengan adanya ketentuan ini, diharapkan dapat lebih merangsang masyarakat untuk bisa pro aktif dalam upaya pemberantasan kejahatan narkoba.
4. Adanya ketentuan bagi orang atau badan yang melakukan kejahatan menyangkut narkoba. Hal ini akan memudahkan pengawasan terhadap pemakaian dan peredaran narkoba.

²⁴ D. Soerdjono, *Narkoba dan Remaja* (Jakarta: Alumni, 1983), h. 77.

5. Penyidikan, penuntutan serta pemeriksaan perkara yang berhubungan dengan narkoba di pengadilan.
6. Adanya ancaman pidana penjara dan pidana denda terhadap siapa saja yang menghalangi atau mempersulit jalannya proses penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan perkara tindak pidana yang menyangkut narkoba.
7. Adanya ancaman pidana penjara dan pidana denda terhadap siapa saja yang mengetahui tentang adanya narkoba yang tidak sah dan tidak melaporkan kepada pihak yang berwajib.²⁵

Pembahasan berikut akan menguraikan klasifikasi perbuatan-perbuatan dan ketentuan-ketentuan mengenai kejahatan narkoba sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009.

1. Penanaman.

Penanaman adalah seseorang yang melakukan dengan sengaja dan tanpa hak menanam, memelihara, mempunyai dalam persediaan memiliki, menyimpan atau menguasai tanaman ganja atau kokain.

2. Peracikan.

Peracikan adalah suatu keadaan di mana seseorang secara tanpa hak memiliki, memproduksi, mengolah, meracik, mengekstraksi atau menyediakan narkoba.

²⁵ D. Soerdjono, *Narkoba dan Remaja*, h. 77.

3. *Pemilikan.*

Pemilikan adalah seseorang tanpa hak memiliki, menyimpan untuk memiliki atau untuk persediaan atau menguasai narkotika.

4. *Pengangkutan.*

Pengangkutan adalah apabila seseorang secara tanpa hak membawa, mengirim, mengangkut atau mentransito narkotika.

5. *Pengedaran.*

Pengedaran adalah apabila seseorang secara tanpa hak mengimpor, mengekspor, menawarkan untuk dijual, menyalurkan, menjual, membeli, menyerahkan, menerima, menjadi perantara dalam jual beli atau menukar narkotika.

6. *Penggunaan.*

Yang dimaksud dengan penggunaan dalam pembahasan ini adalah apabila seseorang secara tanpa hak menggunakan narkotika baik bagi dirinya sendiri maupun digunakan untuk orang lain.²⁶

D. *Teori-Teori Pidanaan*

Hukum pidana tidak lain adalah aturan-aturan hukum yang bertujuan untuk melindungi segala hak dan kepentingan para anggota masyarakat dan Negara, karena hukum pidana tiada lain adalah hukum sanksi. Dengan demikian nampaklah suatu

²⁶ Adnan Hasan Baharits, *Bahaya Obat Terlarang Terhadap Anak Kita* (Jakarta: Gema Insani, 1998), h. 56.

ketegasan akan pentingnya penegakan sanksi hukum pidana terhadap pelaku kejahatan narkoba yang tentu saja akan berdampak positif terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara, Karena penegakan sanksi hukum pidana tersebut akan memberikan beberapa keuntungan antara lain: 1) akan memberikan jaminan keamanan dalam masyarakat; 2) akan memberikan jaminan kesehatan; dan 3) akan memberikan jaminan pemberdayaan ekonomi dalam kehidupan masyarakat.

Di samping hal tersebut di atas, juga adanya suatu jaminan bagi pihak kepolisian dalam melaksanakan fungsinya, termasuk dalam penegakan sanksi hukum pidana terhadap pelaku kejahatan narkoba. Oleh karena itu undang-undang yang ada hubungannya dengan sanksi kejahatan harus diumumkan atau disosialisasikan terlebih dahulu agar setiap warga masyarakat dapat mengetahui batas-batas yang harus dikerjakan dan yang dilarang, karena tidak semua perbuatan atau perilaku dapat dianggap melanggar hukum.

Dengan adanya sosialisasi hukum tersebut akan memberikan suatu batasan yang jelas sehingga masyarakat sendiri akan menentukan pilihannya, atau dengan kata lain tidak mau mengerjakan suatu kejahatan dengan dasar resiko sanksi hukum sebagai konsekuensi hukum pidana, atau mau meninggalkan hal-hal yang dianggap melanggar hukum yang akan memberikan suatu rasa aman terhadap dirinya. Suatu teori tentang perilaku menyimpang seperti yang telah dikemukakan oleh Achmad Ali bahwa:

“Sang individu yang tidak mempunyai kekayaan, lebih memungkinkan untuk menyimpang. Seseorang yang terampas haknya, menyebabkan frustrasi yang

mana pada gilirannya akan memberikan motivasi untuk melibatkan diri dalam perilaku menyimpang”.²⁷

Dalam hukum pidana dikenal adanya tiga teori dasar pemidanaan yang meliputi:

2. Teori *absolute*, bahwa yang melanggar peraturan atau perintah, harus dibalas dengan suatu sanksi pidana sesuai dengan perbuatannya yang dianggap telah melanggar.
3. Teori *relative*, yang membenarkan tentang adanya sanksi oleh pemerintah yang beranggapan bahwa sanksi itu diberikan bukanlah karena sebab membalas perbuatan orang yang bersalah, melainkan karena sanksi itu mempunyai tujuan yaitu agar orang yang telah berbuat salah tidak mengulangi perbuatan-perbuatan yang dianggap salah.

Untuk teori yang kedua, menurut Andi Hamzah melahirkan teori baru yaitu:

- a. Untuk menakuti, menurut teori ini hukuman seyogyanya diberikan sedemikian rupa dengan cara-cara yang mantap sehingga orang menjadi takut atau setidaknya jera untuk melakukan kejahatan atau pelanggaran.
- b. Untuk memperbaiki, sanksi hukum yang diberikan mengandung unsur-unsur yang dapat menghasilkan budi manusia, agar dengan sanksi itu ia tidak akan mengulangi perbuatan-perbuatannya yang tidak berguna bagi kepentingan masyarakat.
- c. Untuk melindungi, tujuan sanksi-sanksi yang diberikan kepada mereka yang melanggar, agar masyarakat tidak dirugikan oleh perbuatan-perbuatan jahat maka dengan diasingkannya untuk sementara maka masyarakat akan merasa terlindungi.²⁸

²⁷Ali, Achmad, *Menguak Tabir Hukum*. Jakarta: Chandra Pratama, 1996), h. 87.

²⁸Andi Hamzah, *Beberapa Catatan Sekitar Pembuat dan Kesalahan dalam Hukum Pidana*. Jakarta: Aksara Baru, 1986), h. 36.

4. Teori yang ketiga adalah teori yang merupakan penggabungan yang dimaksudkan sebagai penggabungan dari teori pembalasan dengan teori tujuan. Menurut teori ini bahwa orang yang dikenakan sanksi hukum pidana tidak saja karena berbuat salah, akan tetapi yang sangat diharapkan adalah supaya tidak berbuat salah lagi.

Berdasarkan uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa tindakan pencegahan sebaiknya menjadi prioritas utama dibandingkan dengan tindakan penegakan sanksi hukum, sebab kalau hanya menunggu kapan orang melakukan pelanggaran lalu diberikan sanksi, maka seakan-akan tidak ada upaya preventif.

E Efektivitas Penegakan Sanksi Pidana pada Tindak Kejahatan Narkotika

Keinginan untuk memahami dengan baik tentang efektivitas penegakan hukum pidana, khususnya pada tindak pidana kejahatan narkotika, secara umum diharapkan untuk memahami apa yang dimaksud dengan hukum itu sendiri. Norma hukum menurut G. Karta Saputra²⁹ adalah “pokok aturan dari segala bentuk perundang-undangan yang mengatur sangkut paut perhubungan anggota masyarakat dengan anggota masyarakat lainnya dalam kehidupan bermasyarakat”. Dengan demikian norma hukum mencakup segala gerak gerik anggota masyarakat tersebut dalam kehidupan sosial baik mengenai dirinya sendiri, keluarganya, kelompoknya ataupun harta bendanya.

²⁹ G. Karta Saputra, *Pengantar Ilmu Hukum* (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 1982), h. 8.

Sebagai suatu analisis perbandingan, maka akan dikemukakan pengertian hukum menurut Soerjono Soekanto yaitu:

“Hukum adalah perangkat-perangkat peraturan tertulis yang dibuat oleh pemerintah melalui badan-badan yang berwenang membentuk berbagai peraturan tertulis seperti berturut-turut: Undang-Undang Dasar, Undang-Undang Keputusan Presiden, dan Peraturan Pemerintah”.³⁰

Dalam kedudukan hukum sebagai sarana kontrol sosial (*law as a tool of social control*), hukum itu bersifat statis yaitu mengatur hubungan-hubungan yang ada. Sedangkan sebagai pembaharu dalam masyarakat (*law as a tool of social engineering*) tidak ditujukan kepada pemecahan masalah yang ada, melainkan berkeinginan untuk menimbulkan perubahan-perubahan dalam tingkah laku anggota masyarakat.³¹

Menurut Achmad Ali bahwa:

“Pemahaman konvensional tentang hukum dalam kehidupan sehari-hari memberikan tempat sentral aturan-aturan hukum, seperti yang diperpegangi oleh kebanyakan lawyer (praktisi hukum) dan juga orang awam. Kasus-kasus hukum muncul karena perbuatan seseorang telah jelas berbenturan dengan satu aturan hukum atau lebih, dan kasus-kasus diselesaikan ketika aturan-aturan yang benar telah ditetapkan”.³²

Hal tersebut di atas memberikan suatu gambaran bahwa cara kerja hukum dalam lingkungan masyarakat adalah untuk menjadikan hukum itu mengontrol dan dikontrol dalam berbagai proses dalam masyarakat. Oleh karena itu terdapat hubungan

³⁰ Soerjono Soekanto, *Sendi-Sendi Ilmu Hukum* (Bandung: PT. Cipta Aditya Bhakti, 1999), h. 25.

³¹ Achmad Ali, *Menjelajahi Kajian Empiris terhadap Hukum* (Jakarta: Yarsif Watampone, 1998), h. 99.

³² Achmad Ali, *Keterpurukan Hukum di Indonesia: Penyebab dan Solusinya* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002), h. 288.

pengaruh mempengaruhi secara timbal balik antara hukum dalam masyarakat, yang dalam hubungan ini hukum sebagai suatu gejala sosial empirik.

Pembagian hukum pidana berdasarkan pada golongan yang di dalamnya terbagi atas 3 yaitu: 1) Hukum pidana sipil; 2) Hukum pidana militer; dan 3) Hukum pidana fiskal. Pembagian hukum pidana tersebut, yang ada relevansinya dengan masalah yang diangkat dalam skripsi ini adalah hukum pidana sipil dan hukum pidana militer.

Hukum pidana sipil adalah hukum pidana yang berlaku bagi anggota masyarakat biasa atau orang-orang sipil. Oleh karena itu keberadaan hukum sipil ini akan memberikan sesuatu kepada para anggota POLRI karena mempunyai pedoman dalam menjalankan tugas dan kewajibannya yaitu mengawasi tingkah laku dan perbuatan-perbuatan orang biasa/umum dalam masyarakat. Sedangkan hukum pidana militer adalah hukum pidana yang mengenai anggota TNI yaitu segala Undang-Undang yang bersangkutan dengan hal-hal yang spesifik militer, sehingga para anggota polisi dan militer dapat mengawasi perilaku tindakan para anggota TNI yang menyimpang dan bertentangan dengan peraturan-peraturan hukum yang berlaku.

Pembangunan hukum pidana tersebut semakin memperjelas langkah-langkah yang harus dilakukan oleh pihak kepolisian dalam menerapkan sanksi atas pelanggaran-pelanggaran, khususnya pelanggaran kejahatan narkoba. Dengan pembagian hukum pidana tersebut, maka tak seorang pun pelanggaran kejahatan yang akan terbebas dari sanksi hukum pidana terhadap pelaku kejahatan narkoba. Oleh karena itu pihak kepolisian sebagai pelaksana tugas dalam bidang penegakan hukum, terutama dalam menanggulangi masalah-masalah narkoba, maka para petugas

penyelidik atau penyidik wajib memiliki pengetahuan dan keterampilan mengenai tata cara mengidentifikasi kejahatan narkoba.



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Lokasi Penelitian

1. Jenis penelitian.

Dalam penelitian hukum dikenal dua jenis penelitian yaitu penelitian normatif (doktrinal) dan penelitian empiris. Jenis penelitian yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah gabungan antara penelitian normatif (doktrinal) dan penelitian empiris. Penelitian normatif digunakan untuk melihat ketentuan-ketentuan mengenai jenis-jenis narkoba, ketentuan-ketentuan mengenai kejahatan narkoba dalam sistem perundang-undangan, dan ancaman pidana pada kejahatan narkoba. Sedangkan penelitian empiris, digunakan untuk melihat pelaksanaan hukum dalam masyarakat, khususnya mengenai kejahatan penyalahgunaan narkoba.

2. Lokasi penelitian.

Penelitian dilakukan di Pengadilan Negeri Kabupaten Polewali Mandar untuk mengetahui faktor-faktor apakah yang menjadi pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pidana pada penyalahgunaan narkoba di Pengadilan Negeri Polewali Mandar serta menganalisis kesesuaian keputusan yang dijatuhkan oleh hakim Pengadilan Negeri Polewali Mandar dengan ketentuan pada Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.

B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan sosiologis (*sociological approach*).

Pendekatan perundang-undangan merupakan pendekatan yang digunakan untuk mengkaji dan menganalisis asas dan sinkronisasi semua perundang-undangan (baik horizontal maupun vertikal) serta peraturan lainnya yang bersangkutan paut dengan masalah yang diteliti. Sedangkan pendekatan sosiologis ialah pendekatan yang menganalisis tentang bagaimana reaksi dan interaksi ketika sistem norma itu bekerja di dalam masyarakat, atau bagaimana penerapan aturan perundang-undangan dalam kehidupan nyata. Pendekatan ini dikonstruksi sebagai sesuatu perilaku masyarakat yang terlembagakan serta mendapat legitimasi secara sosial.³³

Berdasarkan judul penelitian, maka variabel yang akan dikaji dalam penelitian ini hanya satu (variabel tunggal) yaitu “Faktor-faktor yang menjadi pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pidana pada kejahatan narkoba” dengan indikator peranan terdakwa dalam kejahatan narkoba serta jenis narkoba yang melibatkan terdakwa. Penelitian ini bersifat deskriptif-analisis yang mendeskripsikan faktor-faktor yang menjadi pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pidana serta kendala-kendala yang dihadapi oleh hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap kejahatan narkoba.

C. Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang diperlukan dalam penyusunan skripsi ini meliputi data primer dan data sekunder. Data primer sebagai data utama, diperoleh melalui wawancara secara mendalam dengan para informan dalam penelitian ini.

Data primer meliputi hal-hal yang berhubungan dengan dasar dan hal-hal yang

³³ Salim HS dan Erlies SeptianaNurbani, *Penerapan Teori Hukum pada Penulisan Skripsi, Tesis dan Disertasi* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2016), h. 23.

menjadi pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap pelaku kejahatan penyalahgunaan narkoba. Sedangkan data sekunder yang merupakan data pelengkap atau data pendukung terhadap data primer meliputi: jumlah pelaku kejahatan narkoba tahun 2016, aturan perundang-undangan terkait tindak pidana penyalahgunaan narkoba, serta data lainnya yang dapat diperoleh melalui dokumentasi, buku-buku, jurnal dan lain-lain. Sedangkan sumber data adalah para hakim yang telah menyidangkan kasus penyalahgunaan narkoba bernomor, PN:935/PID.B/2016/PN.Plm.

D. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data yang sesuai dengan hal-hal yang diteliti, peneliti menggunakan teknik pengumpulan data yaitu:

1. Wawancara (*interview*), yaitu suatu cara yang ditempuh untuk mengumpulkan data atau informasi dengan cara bertanya secara langsung kepada informan atau sumber informasi, sesuai dengan data yang diperlukan dalam penelitian. Wawancara (*interview*) dilakukan terhadap informan untuk mendalami hal-hal yang sangat dibutuhkan dalam penyusunan skripsi ini.
2. Dokumentasi, yaitu teknik pengumpulan data yang bersifat teoretis melalui literatur seperti buku, jurnal hukum, majalah, serta dokumen-dokumen lainnya di Pengadilan Negeri Polewali Mandar yang berhubungan dengan kasus narkoba yang diteliti.

E. Teknik Analisis Data

Adapun teknik analisis yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis deskriptif kualitatif yang bertujuan untuk mendeskripsikan faktor-faktor yang menjadi pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pidana serta untuk menganalisis dan mendeskripsikan kesesuaian keputusan yang dijatuhkan oleh hakim Pengadilan Negeri Polewali Mandar dengan ketentuan pada Pasal 84 ayat (1) UU Narkotika.



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Penerapan Sanksi Pidana Bagi Pelaku Kejahatan Penyalahgunaan Narkotika Di Pengadilan Negeri Polewali

Untuk mengetahui penerapan sanksi pidana bagi pelaku kejahatan penyalahgunaan narkotika di Pengadilan Negeri Polewali, maka terlebih dahulu dilakukan analisis terhadap putusan majelis hakim berdasarkan putusan Nomor: 186/Pid.Sus/2016/Pol, sebagai berikut:

a. Kasus Posisi.

Bahwa pada hari Rabu tanggal 04 Mei 2016 sekitar jam 13. 15 Wita atau pada suatu waktu lain dalam bulan Mei 2016 bertempat di jalan Manunggal, Kelurahan Pekkabata, Kec. Polewali, Kab. Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat atau pada tempat-tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Polewali, yang berwenang memeriksa dan mengadili, *tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika Golongan I berupa narkotika jenis shabu, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:*

- Bahwa awalnya pada hari Rabu, tanggal 04 Mei 2016, sekitar pukul 13.15 Wita, terdakwa mendapat telepon melalui telepon genggam dari saksi AZMAN ALWI Alias AZMAN Bin ALWI dengan maksud menanyakan apakah terdakwa masih memiliki narkotika jenis shabu untuk dibawa kepada saksi ARAFAH Alias DOPING, lalu

terdakwa menyampaikan bahwa ia masih memiliki jenis narkoba shabu di rumahnya.

- Bahwa sekitar pukul 14.10 Wita, saat berada di Jalan Manunggal atau depan Kantor Bupati Polman, terdakwa yang sedang menunggu kedatangan saksi AZMAN ALWI Alias AZMAN Bin ALWI dengan kendaraan bermotor langsung didekati oleh aksi IRSAN. R Bin RINJING dan saksi IRSAL AGUS SALIM yang kemudian terdakwa berhasil ditangkap dan diamankan oleh saksi IRSAN. R Bin RINJING dan saksi IRSAL AGUS SALIM, lalu dilakukan penggeledahan pada diri terdakwa dan ditemukan 1 (satu) saset plastik narkoba jenis shabu yang kemudia diakui oleh terdakwa bahwa barang tersebut adalah kepunyaannya. Berdasarkan temuan dan informasi tersebut, selanjutnya terdakwa dibawa ke rumah kediamannya dan setelah dilakukan penggeledahan oleh anggota Polisi maka ditemukan 1 (satu) saset plastic bening berisi narkoba jenis shabu, 1 (satu) buah pipet warna putih yang ujungnya runcing, 4 (empat) plastic bening yang semuanya milik terdakwa.
- Bahwa berdasarkan berita acara pemeriksaan di Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Polewali, yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa 1 (satu) saset plastic bening berisi narkoba jenis shabu, 1 (satu) buah pipet warna putih yang ujungnya runcing, 4 (empat) plastic bening termasuk ke dalam daftar narkoba Golongan I Nomor Urut 61 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

b. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum.

Primair: Melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Subsidaire: Melanggar pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

c. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum

Supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

- a. Menyatakan terdakwa AMIRUDDIN Alias MAMI Bin LADA bersalah telah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Dakwaan Primair pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- b. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa AMIRUDDIN Alias MAMI Bin LADA dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalannya dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 100.000.000,- subsidair 2 (dua) bulan kurungan, dengan perintah mereka terdakwa tetap dalam tahanan.
- c. Menyatakan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkotika jenis shabu dirampas untuk dimusnahkan.

- d. Menetapkan agar terdakwa, jika ternyata dipersalahkan dan dijatuhi pidana, supaya dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,00,- (dua ribu rupiah).

d. Putusan Majelis Hakim

1. Menyatakan bahwa terdakwa AMIRUDDIN Alias MAMI Bin LADA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak dan melawan hukum menguasai narkotika Golongan I bukan tanaman”.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 1 (satu) bulan.
3. Menetapkan bahwa masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan.
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan.
5. Memerintahkan supaya barang bukti berupa 2 (dua) saset plastik bening yang berisikan narkotika jenis shabu dengan berat 0,2319 gram; 1 (satu) buah kaca pireks yang terdapat narkotika jenis shabu dengan berat 0,0027 gram; 1 (satu) buah pipet eara putih yang ujungnya runcing; 4 (empat) buah plastik bening yang diduga bekas pakai narkotika jenis shabu; 1 (satu) buah handphone merk Maxtron warna hitam model MG-335 dirampas dan dimusnahkan; uang tunai sebesar Rp. 300.000,- dalam pecahan lima ribu rupiah sebanyak 6 (enam) lembar dirampas untuk Negara; 1 (satu) unit

sepeda motor Suzuki FU 150 warna hitam Nopol. KT 5119 IP dikembalikan kepada yang berhak melalui terdakwa AMIRUDDIN Alias MAMI Bin LADA.

6. Membebani terdakwa membayar biaya perkara sebanyak Rp. 2.000,00,- (dua ribu rupiah).

Dalam mengatasi kejahatan narkoba yang dewasa ini banyak melanda generasi muda bangsa, diperlukan kerja keras dari semua pihak, baik secara preventif maupun secara kuratif melalui lembaga-lembaga terkait. Menurut Bonger bahwa “mencegah kejahatan adalah lebih baik daripada mencoba mendidik penjahat menjadi orang baik kembali”.³⁴

Beberapa upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan efektivitas penegakan sanksi hukum pidana terhadap pelaku kejahatan narkoba, antara lain:

1. Pembinaan dalam keluarga.

Peranan orangtua dalam mencegah keterlibatan anak dalam berbagai tindak kejahatan sangatlah penting. Oleh karena itu pembinaan dalam keluarga sangat penting artinya karena pendidikan pertama yang diperoleh seseorang adalah di dalam lingkungan keluarga tersebut. Pembinaan dalam keluarga perlu ditingkatkan dengan jalan:

a. Menumbuhkan dan membina kehidupan beragama bagi anak.

³⁴Bonger dalam Baharits, Adnan Hasan, *Bahaya Obat Terlarang Terhadap Anak Kita*, Jakarta: Gema Insani, 1998

Pembinaan keyakinan beragama yang didasarkan atas pengertian yang sungguh-sungguh dan sehat tentang ajaran agama yang dianutnya sangat perlu dilaksanakan. Tujuan pembinaan keagamaan dimaksudkan agar seseorang lebih memperkokoh keyakinan keagamaannya dan juga untuk mencegah mereka jangan sampai berbuat hal-hal negatif yang mengarah pada tindak kejahatan.

Agama merupakan bagian integral dari kehidupan manusia. Pendidikan agama bukan hanya sekedar memberikan bekal pengetahuan, tetapi yang lebih penting adalah menumbuhkan kesadaran beragama, memperdalam iman dan taqwa serta mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Dengan pribadi yang beriman dan berakhlak mulia, seseorang dapat memilih mana yang baik dan mana yang buruk dari pengaruh dunia sekitarnya. Oleh sebab itu, diperlukan dukungan seluas-luasnya dari para guru, orangtua dan masyarakat luas.

b. Menumbuhkan rasa kasih sayang dari kedua orangtua.

Kurangnya perhatian dari orangtua, terutama bagi anak yang memasuki masa transisi, sangatlah berbahaya. Orangtua yang terlalu banyak mengurusinya seringkali mengabaikan kehidupan dan pembinaan keharmonisan rumah tangga. Sedikitnya waktu bagi anak untuk bertanya tentang masalah yang dihadapinya kepada orangtuanya menyebabkan anak bingung untuk mencari jawabannya. Hal inilah yang menyebabkan sehingga banyak anak yang mencari jalan keluar dari masalah yang dihadapinya ke hal-hal negatif sehingga sehingga menjerumuskan dan mengarahkan kepada perbuatan kriminal, dan untuk menghilangkan rasa stress yang dihadapinya, biasanya ditempuh dengan mengkonsumsi narkoba.

Oleh karena itu menumbuhkan rasa kasih sayang dari kedua orangtua kepada anak merupakan suatu hal yang sangat penting, sebab anak sangat memerlukan hal itu. Kasih sayang bukan hanya mencakup segala kebutuhan hidup, tetapi kasih sayang yang benar-benar tulus dan ikhlas dari kedua orangtuanya.

2. Mengoptimalkan fungsi kepolisian sebagai aparat penegak hukum.

Mengoptimalkan fungsi aparat penegak hukum sangatlah penting dalam usaha mencegah terjadinya tindak kejahatan narkoba, sebab pihak keamanan merupakan aparat yang harus terjun langsung mengatasi masalah ini. Untuk itu pihak kepolisian dapat melakukan hal-hal sebagai berikut:

- a. Khusus bagi anak usia sekolah di mana kejahatan narkoba sangat banyak melibatkan anak ini, polisi dapat mengadakan razia terutama kepada mereka yang mengenakan pakaian seragam sekolah dan berada di tempat-tempat hiburan atau berkumpul di suatu tempat untuk tujuan yang tidak jelas saat jam pelajaran sedang berlangsung. Begitu pula dengan pemeriksaan tas ataupun bawaan mereka, karena dikhawatirkan mereka membawa narkoba atau barang terlarang lainnya.
- b. Melakukan pengintaian terhadap orang-orang atau tempat-tempat yang rawan transaksi narkoba, termasuk meminta bantuan (laporan) dari masyarakat.
- c. Melakukan pengusutan perkara dan mengajukan ke pengadilan bagi para pelaku yang telah melakukan tindak kejahatan narkoba.

3. Pembinaan kesadaran di bidang hukum.

Pembinaan kesadaran di bidang hukum bagi masyarakat, terutama bagi terpidana sangatlah penting sebab mereka harus diberikan penjelasan tentang m, terutama dalam hal sebagai berikut:

- a. Meningkatkan dan menyemasalah hukum. Untuk itu diperlukan kerjasama antar para penegak hukumpurnakan pembinaan hukum nasional dalam rangka pembaharuan hukum, antara lain dengan mengadakan kodifikasi hukum di bidang tertentu, dengan memperhatikan kesadaran hukum yang berkembang dalam masyarakat.
- b. Meningkatkan kualitas para penegak hukum. Penegak hukum yang dimaksud dalam hal ini pada dasarnya meliputi polisi, jaksa, hakim, masyarakat ataupun pihak-pihak lain yang diberikan wewenang oleh undang-undang untuk melaksanakan atau menegakkan hukum. Sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas para penegak hukum, diperlukan usaha pembinaan terhadapnya misalnya dengan meningkatkan ilmu yang trampil, berakhlak mulia dan mermoral tinggi, disiplin kerja yang tinggi dan lain sebagainya.
- c. Menigkatkan kesadaran hukum masyarakat dengan mengambil pandangan umum bahwa perkembangan hukum akan selalu tertinggal bila dibandingkan dengan perkembangan masyarakat. Kesadaran masyarakat terhadap hukum itu sendiri pada prinsipnya adalah memegang peranan yang penting pula di dalam usaha untuk menciptakan terselenggaranya hukum berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1954.

Di samping telah terciptanya pembaharuan dan peningkatan kualitas para penegak hukum dengan berbagai perangkatnya, kemudian dilanjutkan dengan usaha peningkatan peran serta masyarakat sebagai subyek hukum karena hal ini sangat berpengaruh bagi terciptanya suatu ketertiban dalam masyarakat itu sendiri. Dalam usaha pembinaan kesadaran hukum masyarakat, salah satu cara yang tepat adalah melalui pelaksanaan program penyuluhan hukum yang bertujuan untuk: 1) meningkatkan pemahaman masyarakat akan hukum yang berkenaan dengan hak dan kewajiban, serta pemahaman tentang prosedur peralihan hak dan kewajiban tersebut; dan 2) menjadikan masyarakat patuh akan norma-norma hukum, susila, agama dan norma-norma lainnya, berdasarkan kesadaran hukum yang tinggi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa masalah sanksi yang telah dijatuhkan terhadap pelaku kejahatan narkoba berdasarkan Putusan Nomor 186/Pid.Sus/2016/PN Pol masih sangat rendah jika dibandingkan dengan rendah, padahal kasusnya semakin meningkat dari tahun ke tahun, sehingga terkesan bahwa hukuman yang telah dijatuhkan belum memberikan efek jerah. Dengan demikian pihak pemerintah serta pihak terkait lainnya harus lebih mewaspadai peningkatan tersebut. Terutama kepada para pengedar dan pemasok, tampaknya mereka pada tahap ini lebih memilih dipenjara daripada meninggalkan kebiasaan yang dirasakan bisa mendatangkan “ekonomi” tersebut.

B. Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Sanksi Pidana pada Kejahatan Penyalahgunaan Narkoba di Pengadilan Negeri Polewali

Putusan pengadilan dapat berupa pembebasan terdakwa atau pelepasan terdakwa dari segala tuntutan hukum ataupun penjatuhan pidana terhadap terdakwa. Putusan pengadilan tersebut harus dibacakan dalam sidang pengadilan yang terbuka untuk umum, yang dilakukan setelah proses pemeriksaan di persidangan dianggap sudah selesai dan Jaksa Penuntut Umum mengajukan tuntutananya (*requisition*) yang diikuti dengan pembelaan terdakwa atau penasehat hukumnya.

Pengadilan akan memutuskan terdakwa dibebaskan dari tuntutan, apabila hasil pemeriksaan yang dilakukan di persidangan menunjukkan bahwa perbuatan dan kesalahan terdakwa atas perbuatan pidana yang didakwakan kepadanya itu ternyata tidak terbukti secara sah dan meyakinkan.

Sugito mengemukakan bahwa:

“Apabila perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa tersebut dapat terbukti akan tetapi merupakan perbuatan pidana, maka terdakwa harus dilepas dari segala tuntutan hukum. Dan apabila pengadilan berpendapat, bahwa terdakwa terbukti telah melakukan suatu perbuatan pidana dengan kesalahan sebagaimana yang didakwakan kepadanya, maka pengadilan akan menjatuhkan pidana kepada terdakwa”.³⁵

Dalam hal pengadilan yang memutuskan suatu perkara akan menjatuhkan pidana kepada terdakwa, maka terlebih dahulu hakim yang memeriksa perkara tersebut harus melakukan pertimbangan-pertimbangan mengenai faktor apa yang dapat memberatkan ataupun meringankan pidana yang akan dijatuhkannya kepada terdakwa (Pasal 197 huruf f KUHP).

³⁵Sugito, Hakim Pengadilan Negeri Polewali Mandar, wawancara tanggal 2 Oktober 2017.

Sebelum melakukan pertimbangan-pertimbangan mengenai faktor-faktor yang dapat memberatkan atau meringankan pidana, maka hakim akan mempertimbangkan mengenai fakta dan keadaan yang diperoleh dari pemeriksaan dalam sidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan terdakwa. Harus ada pernyataan telah terpenuhinya semua unsur dalam rumusan perbuatan pidana disertai kualifikasinya sebagai ketentuan Pasal 197 huruf d KUHP.

Mempertimbangkan faktor-fraktor yang dapat memberatkan dan meringankan bagi terdakwa sebagaimana ketentuan di atas, maka pidana yang dijatuhkan oleh hakim diharapkan sesuai dengan perbuatan dan kesalahan terdakwa, tidak berlebihan dan benar-benar diperlukan untuk mempertahankan tata tertib hukum. Dengan demikian, upaya pemidanaan yang dilakukan tersebut bukan hanya semata-mata didasarkan untuk maksud pembalasan, melainkan di dalamnya terkandung tujuan-tujuan tertentu yang ingin dicapai seperti pencegahan, perlindungan bagi masyarakat serta untuk pembinaan.

Dalam *memorie van toelichting wetboek van strafrecht* atau penjelasan kitab undang-undang hukum pidana, di dalamnya diberikan penjelasan sebagai berikut:

“Dalam menentukan tinggi rendahnya pidana, hakim untuk setiap kejadian harus melihat nilai objektif dan sibjektif dari tindak pidana yang dilakukan, harus memperhatikan perbuatan dan pembuatnya. Hak-hak apa saja dilanggar dengan adanya tindak pidana itu? Bagaimanakah sepak terjang kehidupan si pmbuat dulu? Apakah kejahatan yang dipersalahkan kepadanya itu merupakan langkah pertama kearah jalan sesat ataukah suatu perbuatan yang merupakan suatu pengulangan dari watak-watak jahat yang sebelumnya sudah tampak? batas antara minimal dan maksimal harus ditetapkan seluas-luasnya, sehingga meskipun semua pernyataan

diatas dijawab dengan merugikan terdakwa, maksimal pidana yang biasa itu sudah memadai”³⁶

Dari gambaran di atas, untuk mengetahui berat ringannya sanksi pidana, hakim dalam mempertimbangkan pidana yang hendak dijatuhkan kepada terdakwa, maka hakim harus memperhatikan keadaan objektif atas perbuatan dari pelakunya, hakim harus melihat latar belakang kehidupan terdakwa dan bobot perbuatan yang dilakukan. Atau dengan kata lain, hakim dalam menjatuhkan berat-ringannya pidana harus mempertimbangkan faktor-faktor yang ada pada terdakwa dan faktor-faktor perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa.

Dalam Pasal 27 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Pokok-Pokok Kekuasaan Kehakiman, masalah faktor pertimbangan tersebut khususnya yang menyangkut terdakwa, memperoleh penegasan sebagai berikut:

1. Hakim sebagai penegak hukum dan keadilan wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat.
2. Dalam mempertimbangkan berat ringannya hukuman atau pidana, hakim wajib memperhatikan sifat-sifat yang baik dan sifat-sifat yang buruk dari sitertuduh.

Selanjutnya ada suatu masalah yang cukup penting sehubungan dengan dengan pembahasan dalam skripsi ini, yakni tentang pedoman ppidanaan. Pedoman ppidanaan merupakan suatu yang sangat membantu hakim dalam mempertimbangkan berat-ringannya sanksi pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa. Pedoman ppidanaan ini akan memudahkan hakim dalam menetapkan

³⁶Sugito, Hakim Pengadilan Negeri Polewali Mandar, wawancara tanggal 2 Oktober 2017.

ukuran pemidanaan. Apa yang termuat di dalam pedoman pemidanaan tersebut merupakan suatu daftar yang harus diteliti terlebih dahulu sebelum hakim menjatuhkan pidana, sehingga diharapkan pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa dapat lebih proporsional dan dapat dipahami oleh masyarakat luas serta terpidana itu sendiri.

Dalam sistem Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), pedoman pemidanaan tersebut ternyata tidak diatur. KUHP hanya menetapkan beberapa hal yang dapat mengurangi atau memberatkan pemberian pidana. Namun di dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) yang baru, pedoman pemidanaan tersebut, telah diatur dengan jelas. Walaupun RUU KUHP tersebut belum disahkan, tetapi dalam praktik di pengadilan umumnya sudah dilakukan.³⁷ Berikut dijelaskan bunyi kutipan Pasal 44 KUHP, yang mengatur tentang pedoman pemidanaan tersebut:

Dalam pemidanaan hakim harus mempertimbangkan:

1. Kesalahan pembuat;
2. Motif dan tujuan dilakukannya tindak pidana;
3. Cara melakukan tindak pidana;
4. Sikap batin pembuat;
5. Riwayat hidup dan keadaan sosial ekonomi pembuat;
6. Sikap dan tindakan pembuat setelah melakukan tindak pidana;
7. Pengaruh pidana terhadap masa depan pembuat;

³⁷³⁷Sugito, Hakim Pengadilan Negeri Polewali Mandar, wawancara tanggal 2 Oktober 2017

8. Pandangan masyarakat terhadap tindak pidana yang dilakukan;
9. Pengaruh perbuatan terhadap korban dan keluarga korban;
10. Tindak pidana yang dilakukan dengan berencana.

Penyebutan butir-butir di atas tidak limitatif, sehingga hakim bisa saja menambahkan dalam pertimbangan mengenai faktor-faktor lain selain apa yang telah disebutkan di atas. Tetapi paling tidak, semua yang terdapat dalam pedoman pemidanaan tersebut harus dipertimbangkan lebih dahulu.

Menurut M. Adnan, bahwa:

”Selain apa yang telah dikemukakan menurut ketentuan undang-undang sebagaimana yang disebutkan di atas, masih ada hal yang lain yang harus dipertimbangkan oleh hakim dalam menjatuhkan berat ringannya pidana seperti umur terdakwa, jenis kelamin, keseriusan delik yang bersangkutan, akibat yang ditimbulkan oleh perbuatan terdakwa, nilai-nilai khusus daerah setempat dan tingkat dampaknya terhadap filsafat Negara”.³⁸

Untuk berhasilnya suatu pemidanaan, sangat diperlukan adanya saling kerjasama yang baik antara pembuat undang-undang, aparat pemerintah dan hakim. Pembuat undang-undang memberikan pedoman pemidanaan yang jelas bagi hakim, aparat pemerintah melengkapinya dengan data tentang pelanggaran yang dilakukan serta data mengenai kehidupan para terdakwa, dan hakim berdasarkan atas ketentuan perundang-undangan yang baik dan dengan dukungan data yang dibeikan secara detail atau lengkap menjatuhkan pidana kepada terdakwa seobjektif mungkin terhadap terdakwa.

³⁸M. Adnan, Hakim Pengadilan Negeri Polewali, *Wawancara* tanggal 21 Oktober 2017.

Sebagaimana telah diakui bahwa narkoba merupakan sebutan umum yang dikenakan pada jenis-jenis barang atau bahan tertentu yang bila dipakai dapat menimbulkan efek yang berbeda-beda, berat ringannya ancaman pidana yang dikenakan kepada terdakwa disesuaikan pula menurut jenis narkoba yang dipergunakan oleh terdakwa.

Setelah diuraikan pandangan tentang pemidanaan secara normatif, maka selanjutnya dibahas mengenai realitas putusan pemidanaan yang dilakukan oleh hakim dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa terhadap kejahatan narkoba di Pengadilan Negeri Polewali.

Berikut ini adalah faktor-faktor yang ada pada terdakwa **AMIRUDDIN** Alias **MAMI Bin LADA** yang menjadi pertimbangan hakim dalam menjatuhkan berat-ringannya sanksi pidana yang dijatuhkan kepada pelaku kejahatan narkoba. Beberapa pertimbangan yang memberatkan terdakwa, antara lain:

1. Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
2. Perbuatannya bertentangan dengan program pemerintah yang tengah giat-giatnya memberantas narkoba; dan
3. Terdakwa sudah pernah dihukum.³⁹

Pertimbangan tersebut di atas yang terdapat pada putusan pengadilan yang dipertimbangkan oleh hakim dalam menjatuhkan beratnya sanksi pidana terdapat 3 (tiga) poin.

³⁹Putusan No. 186/Pid.Sus/2016/PN Pol

Masing-masing faktor tersebut disebutkan di dalam putusan pengadilan sebagai berikut: perbuatan terdakwa yang dinilai sering meresahkan masyarakat, perbuatan terdakwa yang sangat bertentangan dengan program pemerintah yang tengah giat-giatnya memberantas narkoba, dan terdakwa sudah pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang sama.

Selain pertimbangan yang memberatkan terdakwa tersebut di atas, juga terdapat factor yang dinilai oleh majelis hakim dapat meringankan vonis terhadap terdakwa, antara lain: terdakwa telah bersikap jujur dan mau mengakui perbuatannya, terdakwa telah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi, terdakwa menjadi tulang punggung dalam menafkahi keluarga.

Menurut M. Adnan, bahwa faktor-faktor yang lebih banyak dipertimbangkan oleh hakim dalam menjatuhkan berat ringannya pidana adalah faktor usia, pengalaman dipidana terdakwa, pengakuan terdakwa, dan penyesalan terdakwa.⁴⁰

Dengan tidak adanya ketentuan yang mengatur mengenai pedoman pemidanaan, maka hakim memiliki keleluasan dalam menentukan berat ringannya pidana yang hendak dijatuhkan kepada terdakwa. Namun demikian, dengan kebebasan tersebut bukan berarti hakim dapat berbuat semena-mena menurut perasaan subjektifnya. Hakim tetap dituntut untuk selalu bersikap objektif dalam memeriksa setiap kasus yang ditanganinya. Termasuk dalam hal mempertimbangkan tinggi-

⁴⁰M. Adnan, Hakim Pengadilan Negeri Polewali, *Wawancara* tanggal 21 Oktober 2017.

rendahnya pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa, karena dari tangan hakimlah diharapkan akan lahir rasa keadilan yang didambakan oleh segenap masyarakat.

Setelah menguraikan faktor-faktor yang memberatkan dan meringankan hukuman yang terdapat pada terdakwa serta faktor perbuatan yang dilakukannya, maka faktor lainnya yang turut dipertimbangkan oleh hakim, yaitu faktor menyangkut tentang narkoba yang digunakan oleh terdakwa dalam melakukan kejahatan yaitu:

1. Jenis dan jumlah narkoba, merupakan faktor yang tidak dapat dipisahkan oleh hakim dalam memberikan pertimbangan di dalam menjatuhkan pidana kepada terdakwa.
2. Golongan berapa yang digunakan oleh terdakwa, hakim dalam memberikan pertimbangan tidak begitu sulit dalam pembuktian di pengadilan karena sudah jelas di dalam peraturan perundang-undangan.
3. Peranan pelaku merupakan salah satu faktor yang sangat sulit pembuktiannya, apakah ia sebagai pelaku ataukah sebagai penyimpan.

Perkara-perkara narkoba yang disidangkan oleh hakim di pengadilan banyak mengalami kendala. Masalah penjatuhan pidana adalah persoalan yang sangat pelit lebih-lebih pada kasus kejahatan narkoba, dimana para pelaku kejahatan seringkali berperan sebagai korban yang perlu memperoleh perawatan secara baik. Apabila yang menjadi korban sekaligus terdakwa adalah generasi mudah khususnya para pelajar sehingga pemberian pidana terlalu tinggi bisa berakibat fatal atau buruk pada diri dan masa depan terdakwa. Begitupun sebaliknya jika hakim dalam putusannya memberikan penjatuhan pidana terlalu ringan akan berakibat buruk terhadap

lingkungan masyarakat, karena masyarakat menganggap bahwa kejahatan narkoba merupakan suatu bentuk kejahatan yang dapat merusak sendi-sendi kehidupan masyarakat dan bangsa.

Penyalagunaan narkoba merupakan kekuatan yang dapat mengacaukan masyarakat secara keseluruhan, di mana narkoba merupakan produk maupun pencetus kejahatan. Narkoba merupakan suatu penyakit yang menjangkiti lembaga-lembaga negara, fenomena narkoba merupakan suatu ancaman terhadap setiap tingkat lapisan masyarakat terhadap individu, terhadap komunitas kita, terhadap negara dan terhadap perdamaian dan keamanan dunia internasional.

Dalam hal inilah hakim diperhadapkan pada sebuah dilema di dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku kejahatan narkoba, di mana hakim harus memperhatikan kepentingan masyarakat di satu pihak, bahwa perbuatan terdakwa tersebut adalah perbuatan yang harus dijatuhi hukuman yang berat, sedangkan di pihak lain adalah menyangkut kepentingan terdakwa sendiri. Hal-hal inilah yang merupakan hambatan yang sering dialami oleh hakim di dalam menjatuhkan suatu putusan pidana terhadap terdakwa narkoba.

Menurut M. Adnan, mengatakan bahwa:

“Meskipun ada yang mengatakan bahwa salah satu kendala dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap pelaku kejahatan narkoba adalah kurangnya profesionalisme hakim dalam memahami aturan-aturan yang terkait dengan kasus narkoba secara kontekstual, namun hal demikian tidak dirasakan oleh para hakim khususnya di Pengadilan Negeri Polewali Mandar karena sebenarnya aturan-aturan mengenai narkoba sudah terlalu jelas dan tegas dalam Undang-

Undang Nomor 35 Tahun 2009, dan tidak ada yang kabur maknanya sehingga membutuhkan analisa yang mendalam”.⁴¹

Berbeda dengan pernyataan tersebut di atas, Sugito mengakui bahwa:

“Salah satu kendala dalam proses penyelesaian kasus kejahatan narkoba, apalagi untuk menumpas habis kejahatan yang terkait dengan masalah narkoba tersebut adalah persaksian, karena umumnya saksi dalam kasus kejahatan narkoba adalah pihak kepolisian yang mengungkap kejahatan itu sendiri. Kurangnya kerja sama masyarakat untuk mau melaporkan kejahatan narkoba tersebut kepada pihak kepolisian merupakan salah satu kendala dalam menyelesaikan/meminimalisir kasus kejahatan narkoba tersebut”.⁴²

C. Komentor Penulis.

Analisis terhadap kasus tersebut, dalam proses persidangan pengadilan terhadap penyalahgunaan narkoba yang mendudukkan terdakwa di muka persidangan sampai dengan penjatuhan pidana kepada terdakwa. Terlebih dahulu penulis akan mengkaji surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum.

Penulis melihat bahwa tuntutan Jaksa Penuntut Umum dengan tuntutan 4 (empat) tahun dikurangi masa penahanan yang telah dijalannya dan vonis Hakim Pengadilan Negeri Polewali dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 1 (satu) bulan masih sangat ringan jika dibandingkan dengan pasal yang didakwakan yakni pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 dengan ancaman pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun serta denda paling sedikit sebesar Rp. 800.000.000,00,- (delapan ratus juta rupiah) dan paling

⁴¹ M. Adnan, Hakim Pengadilan Negeri Polewali, *Wawancara* tanggal 21 Oktober 2017.

⁴² Sugito, Hakim Pengadilan Negeri Polewali, *Wawancara* tanggal 21 Oktober 2017.

banyak sebesar Rp. 8.000.000.000,00,- (delapan miliar rupiah), sehingga penulis berpendapat bahwa dengan hukuman yang sangat ringan tersebut membuat para pelaku kejahatan penyalahgunaan narkoba (pengguna maupun pengedar) tidak merasa jerah dan bakal mengulangi pelanggaran serupa, sehingga kasus serupa relatif semakin meningkat setiap tahunnya dan ini sudah menjadi fakta bahwa banyak residivis dalam kasus narkoba disebabkan salah satunya adalah karena hokum yang sangat ringan dan tidak memberikan efek jerah terhadap pelaku.

Untuk memenuhi dakwaan *primair* di atas, perbuatan terdakwa harus memenuhi unsur-unsur sebagaimana dirumuskan dalam pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009.

Primair: Pasal 111 huruf a Undang-Undang Nomor 22 tahun 1997 jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, dengan unsur-unsur sebagai berikut:

1. Setiap orang.

Unsur ini menunjuk kepada pengertian siapa saja orang sebagai pendukung hak dan kewajiban, dalam hal ini yang dimaksud adalah terdakwa AMIRUDDIN Alias MAMI Bin LADA yang telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum telah melakukan suatu tindak pidana yang identitasnya secara lengkap telah disebutkan dalam surat dakwaan yang dibenarkan oleh terdakwa sendiri. Dengan demikian maka unsur Setiap Orang adalah terdakwa AMIRUDDIN Alias MAMI Bin LADA telah terpenuhi.

2. Tanpa hak dan melawan hukum.

Unsur ini mengandung makna bahwa yang dimaksud dengan *tanpa hak* adalah tidak adanya izin untuk melakukan perbuatan tersebut. Instansi yang berwenang memberi izin dalam hal ini adalah pejabat yang berwenang, ternyata pada waktu dilakukan penangkapan sampai sekarang, di mana pada diri terdakwa telah terdapat narkotika jenis shabu, 2 (dua) saset plastik bening yang berisikan narkotika jenis shabu dengan berat 0,2319 gram; 1 (satu) buah kaca pireks yang terdapat narkotika jenis shabu dengan berat 0,0027 gram; 1 (satu) buah pipet earna putih yang ujungnya runcing; 4 (empat) buah plastik bening yang diduga bekas pakai narkotika jenis shabu, terdakwa tidak mempunyai izin. Dengan demikian unsur “*tanpa hak*” telah terpenuhi.

3. Memberikan narkotika golongan I untuk digunakan orang lain.

Berdasarkan keterangan saksi-saksi, dan keterangan terdakwa sendiri, AMIRUDDIN Alias MAMI Bin LADA telah terbukti secara sah dan meyakinkan memiliki narkotika jenis shabu yang ingin dijual kepada saksi IRSAN. R Bin RINJING dan saksi IRSAL AGUS SALIM yang ternyata adalah petugas dari kepolisian. Dengan demikian unsur memberikan narkotika kepada orang lain untuk digunakan telah terpenuhi.

Subsidiar: Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 jo pasal 55 ayat

(1) ke-1 KUHP dengan unsur-unsur sebagai berikut:

1. Siapa saja.

Unsur ini menunjuk kepada pengertian orang siapa saja sebagai pendukung hak dan kewajiban, yang dalam hal ini yang dimaksud adalah terdakwa AMIRUDDIN Alias MAMI Bin LADA yang telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum telah melakukan suatu tindak pidana yang identitasnya secara lengkap telah disebutkan dalam surat dakwaan yang dibenarkan sendiri oleh terdakwa. Dengan demikian, unsur *siapa saja* adalah terdakwa AMIRUDDIN Alias MAMI Bin LADA telah terpenuhi.

2. Tanpa hak dan melawan hukum.

Unsur ini mengandung makna bahwa yang dimaksud dengan *tanpa hak* adalah tidak adanya izin untuk melakukan hal tersebut. Instansi yang berwenang memberikan izin dalam hal ini adalah pejabat yang berwenang. Ternyata pada waktu dilakukan penangkapan sampai sekarang, di mana pada diri terdakwa terdapat narkotika jenis shabu 0,2319 gram, terdakwa tidak mempunyai izin untuk itu. Dengan demikian unsur *tanpa hak* telah terpenuhi.

3. Memiliki, menyimpan untuk dimiliki atau untuk persediaan atau untuk menguasai narkotika golongan I.

Unsur yang dimaksud disini adalah bahwa sesaat, sebelum dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa, ternyata terdakwa memiliki, menyimpan dan/atau menguasai narkotika jenis shabu sebesar 0,2319 gram yang diketemukan oleh petugas polisi yang menyamar.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan di atas, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Penerapan sanksi pidana terhadap pelaku kejahatan sebagaimana narkoba diatur dalam undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, ketentuan mengenai sanksi pidana bagi pelaku kejahatan narkoba diuraikan secara tersendiri, dan ancaman pidananya yang lebih berat juga disertai dengan pidana denda yang sangat tinggi. Oleh majelis hakim Pengadilan Negeri Polewali dijatuhkan hukuman selama 1 (satu) tahun dan 1 (satu) bulan penjara.
2. Faktor-faktor yang menjadi pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana pada kejahatan narkoba terdiri atas 2 (dua) faktor yaitu yang ada pada diri terdakwa yang meliputi: usai terdakwa, pengalaman dipidana, pengakuan, sikap penyesalan, kesopanan, kelanjutan pendidikan, kedudukan dalam keluarga, serta kedudukan dalam masyarakat. Sedangkan faktor di luar diri terdakwa adalah jenis dan jumlah narkoba yang digunakan, golongan narkoba yang digunakan, serta peran pelaku dalam kejahatan penyalahgunaan narkoba tersebut.

B. Implikasi Penelitian

Untuk meminimalisir dan mengantisipasi terjadinya kejahatan narkoba yang telah merusak seluruh sendi-sendi kehidupan masyarakat, maka disarankan hal-hal sebagai berikut:

1. Para pembuat undang-undang hendaknya memberikan pedoman penindasan khusus yang memenuhi skala prioritas tentang narkoba sebagai pedoman pemidanaan mengenai pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana kepada terdakwa, karena KUHP belum cukup menjadi pedoman pemidanaan bagi hakim, di mana hakim sebagai penegak hukum yang berwenang mengadili hanya mempertimbangkan faktor-faktor yang ada di lapangan pada saat persidangan. Oleh sebab itu diperlukan suatu pedoman khusus pemidanaan yang dapat membuat putusan hakim menjadi lebih obyektif.
2. Hakim dalam mempertimbangkan faktor berat-ringannya putusan pidana pada kasus kejahatan narkoba, sebaiknya tidak hanya melakukan pertimbangan pada saat proses persidangan berlangsung, tetapi hendaknya juga di luar proses persidangan. Hal ini dimaksudkan agar hakim dapat menggali lebih banyak lagi faktor-faktor yang terkait dengan masalah tersebut. Pertimbangan tidak hanya yang ada pada terdakwa, perbuatan, dan faktor narkoba saja sehingga hakim dalam menjatuhkan putusan pidana sesuai dengan kesalahan terdakwa.
3. Dalam setiap persidangan di pengadilan, saksi yang pada umumnya dari anggota POLRI hendaknya dilakukan pemanggilan yang sesuai dengan prosedur yang berlaku, seperti saksi pada umumnya dipanggil secara tertulis, serta diberikan

interval waktu yang layak untuk sebuah pemanggilan bagi para saksi dalam memberikan kesaksian di persidangan.

4. Khusus untuk kejahatan penyalahgunaan narkoba yang pelakunya melibatkan aparat atau pejabat negara yang seharusnya menjadi contoh, hendaknya hakim memberlakukan azas "*lex specialist*" yaitu sanksi lebih berat yang seharusnya khusus diberikan kepada pelaku yang (perbuatannya) menjadi contoh, baik dalam kehidupan masyarakat maupun dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Misalnya seorang anggota dewan terhormat (DPR/DPRD) yang terlibat kasus kejahatan narkoba, maka sanksinya semestinya dua kali lipat kejahatan yang dilakukan oleh masyarakat biasa.



DAFTAR PUSTAKA

Buku-Buku

Abdullah, Wahidah, *Pelaksanaan Pendidikan Islam dan Implementasinya Terhadap Penanggulangan Penyalahgunaan Narkoba*. Makassar: Alauddin University Press, 2009.

Ali, Achmad, *Menguak Tabir Hukum*. Jakarta: Chandra Pratama, 1996.

_____, *Menjelajahi Kajian Empiris terhadap Hukum*. Jakarta: Yarsif Watampone, 1998.

_____, *Pengadilan dan Masyarakat*. Makassar: Hasanuddin University Press, 1999.

_____, *Keterpurukan Hukum di Indonesia (Penyebab dan solusinya)*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002.

Baharits, Adnan Hasan, *Bahaya Obat Terlarang Terhadap Anak Kita*, Jakarta: Gema Insani, 1998.

Drdjosisworo, Soedjono, *Hukum Narkotika Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1990.

Hamzah, Andi, *Suatu Tinjauan Ringkas Sistem Pemidanaan di Indonesia*, Jakarta: Akademika Presido, 1985.

_____, *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia*, Jakarta: Pradnya Paramita, 1986.

_____, *Beberapa Catatan Sekitar Pembuat dan Kesalahan dalam Hukum Pidana*. Jakarta: Aksara Baru, 1986.

_____, *Delik-Delik Tersebar di Luar KUHP dan Komentarnya*, Bandung: Pradnya Paramita, 1997.

Hawari, Dadang, *Pendekatan Psikiatri Klinis pada Penyalahgunaan Zat*, Jakarta: Pascasarjana UI, 1990.

_____, *Penyalahgunaan Narkotika dan Zat Adiktif*, Jakarta: FKUI, 1991.

_____, *Al-Qur'an: Ilmu Kedokteran Jiwa dan Kesehatan Jiwa*, Jakarta: PT. Dana Bhakti Prima Yasa, 1997.

Julianan, Lisa FR dan Nengah Sutrisna W. *Narkoba, Psikotropika dan Gangguan Jiwa Tinjauan Kesehatan dan Hukum*. Yogyakarta: Nuha Medika, 2013.

Kanang, Abdul Rahman, *Perlindungan Hukum dan Pemenuhan Hak Konstitusional Anak Perspektif Hukum Internasional, Hukum Positif dan Hukum Islam*. Makassar: Alauddin University Press, 2011.

Kusumah, Mulyana W., *Kejahatan dan Penyimpangan*, Jakarta: Yayasan LBHI, 1988.

Makara, Suhasril Moh. Taufik dan Moh. Zakky, *Tindak Pidana Narkotika*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003.

Med Press Teamwork, *Crime trend: Berbagai Modus Operandi Tindak Kejahatan di Masa Krisis dan Kiat Penanggulangannya*. Yogyakarta: Media Pressindo, 1999.

Moeljatno, *Perbuatan Pidana dan Pertanggung-Jawaban dalam Hukum Pidana*, Jakarta: Bina Aksara, 1983.

_____, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Jakarta: Bina Aksara, 1985.

Muladi, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Bandung: Alumni, 1984.

Mulyadi, Lilik. "Pemeriksaan Terhadap Pengedar dan Pengguna Narkotika (penelitian terhadap asas, teori, norma, dan praktik penerapannya dalam putusan pengadilan)", *Laporan Penelitian* (Puslitbang Hukum dan Peradilan Badan Litbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2012.

Prakoso, Djoko, *Masalah Pemberian Pidana dalam Teori dan Praktek Peradilan*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1989.

Purwadarminta W. J.S, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta: PN. Balai Pustaka, 1980.

Purwanto, Chandra. "Mengetahui dan Mencegah Bahaya Narkotik," dalam Wahidah Abdullah, *Pelaksanaan Pendidikan Islam dan Implementasinya terhadap Penanggulangan Penyalahgunaan Narkotika*. Makassar: Alauddin University Press, 2009.

- Raharjo, Satjipto, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafindi Persada, 1991.
- Sanita, Santi, *Bahaya Nafza Narkoba*. Jakarta: Bee Media Indonesia, 2008.
- Saputra, G. Karta, *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo, 1982.
- Sasangka, Hari, *Narkotika dan Psikotropika Dalam Hukum Pidana*. Bandung: Mandar Maju, 2013.
- Shalih Bin Ghanim As-Sadlan, “Bahaya Narkotika Mengancam Umat,” dalam Zainuddin Ali. *Hukum Pidana Islam*. Cet. Ke-2; Jakarta: Sinar Grafika, 2009.
- Siswanto, *Politik Hukum Dalam Undang-Undang Narkotika*. Rineka Cipta, 2011.
- Soekanto, Soerjono, *Sendi-Sendi Ilmu Hukum*. Bandung: PT. Cipta Aditya Bhakti, 1999.
- Soerdjono, D., *Narkotika dan Remaja*. Jakarta: Alumni, 1983.
- Soesilo, R., *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal demi Pasal*. Bogor: Politeia, 1974.
- _____, *Pelaksanaan Peradilan Pidana Berdasar Teori dan Praktek – Penahanan – Dakwaan – Requisitor*. Jakarta: Rineka Cipta, 1994.
- Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Bandung: Alumni, 1981.
- Sunggono, Bambang, *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers, 2013.
- Tjahjadi, Lili, *Hukum Moral*, Jakarta: Kanisius, 1991.
- _____, *Pidana dan Pemidanaan*. Jakarta: Sinar Grafika, 2000.
- UIN Alauddin Makassar. *Pedoman Penulisan Karya Tulis Ilmiah: Makalah, Skripsi, Tesis, Disertasi dan Laporan Penelitian*. Makassar: Alauddin Pers, 2013.
- Waluyo, Bambang, *Penelitian Hukum dalam Praktek*. Jakarta: sinar Grafika, 1996.
- Weda, I Made Darma, *Kriminologi*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1996.

Perundang-Undangan:

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Hakim Sebagai Pejabat Negara.



Lampiran – Lampiran

PENGAJUAN JUDUL SKRIPSI

Hal : Permohonan Judul Skripsi

Kepada Yth,
Ketua Jurusan / Program Studi
Ilmu Hukum
Fakultas Syari'ah Dan Hukum
Di Samata - Gowa

AssalamuAlaikum Wr Wb

Yang bertanda tangan dibawah ini

Nama : NUR AULIA SARI
Nim : 10500113229
Semester/Angk : VII (Genap) / 2013

Dengan ini mengajukan permohonan judul skripsi sebagai berikut:

sec ① ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN SANKSI
PIDANA TERHADAP PELAKU KEJAHATAN PENYALAHGUNAAN
NARKOTIKA (studi putusan PN.Polman Nomor 935/PHD.B/2016/PN.Plm) ✓
2. TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PELAKSANAAN PIDANA BERSYARAT
(studi kasus di Balai Pemasyarakatan Kelas 1 Makassar) X
3. TINJAUAN HUKUM PIDANA MENGENAI DELIK PEMERKOSAAN
TERHADAP ANAK DI BAWAH UMUR (Studi Kasus di Polres dan Pengadilan
Negeri Polman) X

Demikian permohonan ini saya ajukan, atas perhatian dan persetujuannya saya ucapkan
terima kasih. Wassalamu Alaikum Wr Wb

10 Agustus 2017

Mengetahui,
Penasehat Akademik

Pemohon,

(Eman Sukaiman, S.H., M.H.)

(Nur Aulia Sari)

14 AUG 2017

RAHMAN SYAMSUDDIN, SH., MH.
NIP. 19821207 200901 1 010

PERSETUJUAN JUDUL SKRIPSI DAN PEMBIMBING

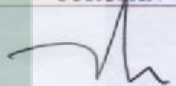
JUDUL SKRIPSI/MASALAH	HARI/TANGGAL	MENYETUJUI SEKERTARIS JURUSAN
<p>RUMUSAN</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Faktor-faktor apakah yang menjadi pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap pelaku kejahatan narkoba di PN Polman ? 2. Bagaimana kesesuaian keputusan yang dijatuhkan PN Polman tersebut dengan ketentuan Pasal 84 ayat (1) UU tentang Narkotika? <p>JUDUL SKRIPSI ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN SANKSI PIDANA TERHADAP PELAKU KEJAHATAN PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA (studi putusan PN.Polman Nomor.935/PID.B/2016/PN.Plm)</p>	<p style="text-align: center;">1965 AUG 2017</p>	<p style="text-align: center;"></p> <p style="text-align: center;">RAHMAT SYAMSUDDIN, SH, MH. NIP. 19821207 200901 1 010</p>
<p>RUMUSAN MASALAH</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Apakah kelebihan penjatuhan pidana bersyarat dibandingkan pidana kurungan ? 2. Bagaimana pelaksanaan pengawasan dan pembimbingan terhadap terpidana bersyarat di Balai Pemasyarakatan Makassar ? <p>JUDUL SKRIPSI TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PELAKSANAAN PIDANA BERSYARAT (studi kasus di Balai Pemasyarakatan Kelas I Makassar)</p>		

RUMUSAN MASALAH

1. Apakah faktor yang memicu terjadinya delik pemerkosaan terhadap anak dibawah umur?
2. Bagaimana proses hukum kasus tersebut di Polres,Kejaksaan,dan Pengadilan Negeri di Polman?
3. Apa saja upaya yang telah dilakukan pihak berwajib dalam menanggulangi terjadinya pemerkosaan anak di bawah umur ?

JUDUL SKRIPSI

TINJAUAN HUKUM PIDANA
MENGENAI DELIK
PEMERKOSAAN TERHADAP
ANAK DI BAWAH UMUR
(Studi Kasus di Polres dan
Pengadilan Negeri Polman)

PEMBIMBING	HARI/TANGGAL	MENYETUJUI KETUA JURUSAN
1. Dr. Hamsir SH. M.Hum 2. Dra. Nila Sastrowati N.Si	22 AUG 2017	

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

ALAUDDIN

M A K A S S A R



KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UIN ALAUDDIN MAKASSAR
Nomor : 1095 Tahun 2017
TENTANG DOSEN PEMBIMBING DRAF/SKRIPSI
TAHUN 2017

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Alauddin Makassar setelah :

- Menimbang :**
- Bahwa penulisan karya ilmiah (skripsi) merupakan salah satu persyaratan pada Jenjang strata satu (S1) Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Alauddin Makassar, Untuk itu dipandang perlu menetapkan dosen pembimbing;
 - Bahwa mereka yang tersebut namanya pada surat keputusan ini dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk di angkat dan diserahi tugas sebagai dosen Pembimbing Draft/Skripsi.

- Mengingat :**
- Undang- Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - Peraturan Pemerintah RI Nomor 04 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
 - Peraturan Menteri Agama RI Nomor 20 Tahun 2014 Tentang Statuta UIN Alauddin Makassar
 - Peraturan Menteri Agama RI Nomor 85 Tahun 2013 Tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN Alauddin Makassar
 - Keputusan Rektor UIN Alauddin Makassar Nomor 200 Tahun 2016 Tentang Pedoman Edukasi UIN Alauddin Makassar.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :**
- | | | |
|---------------------|---|---|
| a. Menunjuk saudara | : | 1. Dr. Hamsir., SH., MH
2. Dra. Nila Sastrawati., M.Si |
|---------------------|---|---|

Sebagai pembimbing mahasiswa :

Nama	:	Nur Aulia Sari
NIM	:	10500113229
Fakultas/Jurusan	:	Syari'ah dan Hukum / Ilmu Hukum
Judul Skripsi	:	"Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Sanksi Pidana Pada Kejahatan Penyalahgunaan Narkotika (Studi Putusan Pengadilan Negeri Polman No.935/Pid.B/2016/PN.Plm)."

- Melaksanakan pembimbing Skripsi sampai mahasiswa tersebut menyelesaikan penulisan karya ilmiah secara profesional;
- Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya Surat keputusan ini dibebankan kepada Anggaran DIPA/APBN/PNBP UIN Alauddin Makassar Tahun 2017
- Surat keputusan disampaikan kepada masing-masing yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Ditetapkan di : Samata

Pada tanggal : 22 Agustus 2017



Prof. Dr. Darussalam Svamsuddin, M.Ag

NIP. 19621016 199003 1 003

LEMBAR PENGESAHAN
DRAFT SKRIPSI

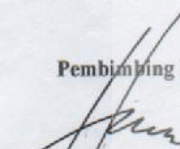
*"Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Sanksi Pidana Pada Kejahatan
Narkotika (Studi Putusan Pengadilan Negeri Polewali Mandar No.
935/PID.B/2016/Pn.Plm)"*

Disusun dan Diajukan Oleh

NUR AULIA SARI
NIM: 10500113229

Telah disetujui oleh Pembimbing untuk melanjutkan Penulisan skripsi
Pada tanggal : 25 September 2017

Pembimbing I


Dr. Hamsir, S.H., M.Hum
NIP. 19640601 199303 1 003

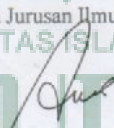
Pembimbing II


Dra. Nila Sastrawati, M.si.
NIP. 19710712 199703 2 002

Diketahui Oleh

Ketua Jurusan Ilmu Hukum


UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

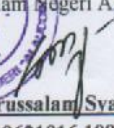

ALAUDDIN

Istiqamah, SH., MH

M A K A S S A R
NIP: 19680120 199503 2 001

Mengesahkan


Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar


Prof. Dr. Darussalam Svamsuddin, M.Ag
NIP: 19621016 199003 1 003

PERSETUJUAN PEMBIMBING


Pembimbing penulisan skripsi saudara **NUR AULIA SARI** NIM: 10500113229, Mahasiswa Jurusan Ilmu Hukum pada Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Alauddin Makassar, setelah meneliti dan mengoreksi secara seksama skripsi berjudul "Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Sanksi Pidana Pada Kejahatan Narkotika (Studi Putusan Pengadilan Negeri Polewali No. 186/Pid.Sus/2016/PN.Pol)", memandang bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah dan dapat di setujui untuk di seminarkan.

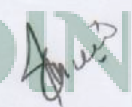
Demikian persetujuan ini di berikan untuk di proses lebih lanjut.

Samata, 15 November 2017

Pembimbing I

Pembimbing II


Dr. Hamsir, S.H., M.H.
NIP. 19640601 199303 1 003


Dra. Nila Sastrawati, M.Si
NIP. 19710712 199703 2 002



PENGADILAN NEGERI POLEWALI KELAS II

Jalan Mr.Muh.Yamin Nomor 15
Kabupaten Polewali Mandar Propinsi Sulawesi Barat
☎Telp; (0428) 21331 Fax : (0428) 21014
Website:www.pn.polewali.go.id
Email: Pengadilannegeripolewali@gmail.com

SURAT KETERANGAN TELAH MELAKSANAKAN PENELITIAN

Nomor : W22-U21/669/HK/X/2017

Yang bertanda tangan dibawah ini Panitera Pengadilan Negeri Polewali,
menerangkan bahwa :

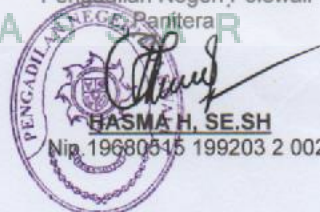
Nama : NUR AULIA SARI
Nim : 10500113229
Fakultas/Jurusan : Syari'ah dan Hukum/Ilmu Hukum
Semester : IX (Sembilan)
Alamat : Samata, Gowa
Judul Skripsi : Analisis Perimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan
Sanksi Pidana Pada Kejahatan Narkotika
(Studi Putusan Pengadilan Polewali Mandar
No.186/Pid Sus/2016/Pn.Pol).

Mahasiswa tersebut diatas, telah melaksanakan Penelitian pada Kantor
Pengadilan Negeri Polewali dari tanggal 9 Oktober 2017 s/d 09 November 2017.

Demikian Surat Keterangan ini kami buat, untuk dipergunakan sebagaimana
mestinya.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
MAKASSAR

Polewali, 23 Oktober 2017
Pengadilan Negeri Polewali



H. ASMA H. SE, SH
Nip. 19680845 199203 2 002



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Kampus II : Jl. H. M. Yasin Limpo No. 36 Samata Sungguminasa – Gowa
Telp. 841879 Fax 8221400

**KEPUTUSAN
DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM UIN ALAUDDIN MAKASSAR
Nomor : 187 Tahun 2017
TENTANG
PANITIA DAN PENGUJI UJIAN SEMINAR HASIL/SKRIPSI
TAHUN 2017**

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar setelah

- Membaca** : Nama : Nur Aulia Sari
NIM : 10500113229
Jurusan : Ilmu Hukum
Hari/Tanggal : Jumat, 24 November 2017
Prihal : Ujian Seminar Hasil/Skripsi
Judul : "Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Sanksi Pidana Pada Kejahatan Narkotika (Studi Putusan Pengadilan Negeri Polewali No.168./Pid. Sus/2016/PN.PLW)"
- Menimbang** : a. Bahwa mahasiswa tersebut di atas telah memenuhi persyaratan dan ketentuan Ujian Seminar Hasil/Skripsi;
b. Bahwa dengan terpenuhinya persyaratan dan ketentuan di atas, maka perlu ditunjuk Panitia dan Dosen Penguji;
c. Bahwa mereka yang tersebut namanya pada lampiran Surat Keputusan ini dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk diserahi tugas melaksanakan kegiatan dimaksud.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah RI Nomor 04 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
3. Keputusan Menteri Agama RI. Nomor 289 Tahun 1993 Jo Nomor 202 B Tahun 1998 tentang Pemberian Kuasa dan Wewenang Manandatangani Surat Keputusan;
4. Keputusan Menteri Agama RI. Nomor 20 Tahun 2014 tentang Statuta UIN Alauddin Makassar;
5. Peraturan Menteri Agama RI. Nomor 25 Tahun 2013 Juncto Peraturan Menteri Agama RI Nomor 85 tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN Alauddin Makassar;
6. Keputusan UIN Rektor UIN Alauddin Makassar Nomor 200 Tahun 2016 tentang Pedoman Edukasi UIN Alauddin Makassar.
- MEMUTUSKAN**
- Menetapkan** : **Pertama** : Membentuk Panitia dan Penguji Ujian Seminar Hasil/Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar dengan komposisi sebagai berikut :
- Ketua : Prof. Dr. Darussalam Syamsuddin, M.Ag
Sekretaris : Istiqamah, S.H., M.H
Penguji I : Rahman Syamsuddin, S.H., M.H
Penguji II : Dr. Jumadi, M.H
Pelaksana : 1. Mujahidah, S.E
2. Andriyanto, S.E
- Kedua** : Panitia bertugas mempersiapkan penyelenggaraan Ujian Seminar Hasil/Skripsi
Ketiga : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya Surat Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran DIPA/APBN/PNBP UIN Alauddin Makassar Tahun 2017;
Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkannya dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan di dalamnya akan diperbaiki sebagaimana mestinya.
- Keputusan ini disampaikan kepada masing-masing yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.



Samata Gowa
November 2017

Prof. Dr. Darussalam Syamsuddin, M.Ag
NIP. 19621016 199003 1 003

Tembusan :
Yth. Rektor UIN Alauddin Makassar di Samata – Gowa;
(Sebagai Laporan)



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Kampus I : Jalan Sultan Alauddin No. 63 Tj (0411) 864928-864930 Fax. 864923
Kampus II : Jl. H. M. Yasin Limpo No. 36 Samata Sungguminasa – Gowa Telp. 841879 Fax 8221400

Nomor : B-4091/SH.01/PP.00.9/11/2017
Sifat : Penting
Hal : Undangan Ujian Seminar Hasil

Samata, November 2017

Kepada Yth :

1. Prof. Dr. Darussalam Syamsuddin, M.Ag. (Ketua)
2. Istiqamah, S.H., M.H (Sekertaris)
3. Rahman Syamsuddin, S.H., M.H (Penguji I)
4. Dr. Jumadi, M. H.. (Penguji II)
5. Dr. Hamsir, M.Hum (Pembimbing I)
6. Dra. Nila Sastrawati, M.Si (Pembimbing II)
7. Pelaksana.

Di
Makassar

Assalamu 'Alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat, disampaikan bahwa Ujian Seminar Hasil/Skripsi atas nama :

Nama : Nur Aulia Sari
N I M : 10500113229
Jurusan : Ilmu Hukum

Untuk maksud tersebut, maka kami mengundang Saudara/i) pada Ujian Seminar Hasil/Skripsi, Insya Allah dilaksanakan pada :

Hari/Tanggal : Jum'at, 24 November 2017
Waktu : Pukul 09.00-10.00 Wita
Tempat : Ruang Jurusan IH

Atas perhatian dan kehadirannya diucapkan terima kasih.

Wassalam
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
MAKASSAR

Prof. Dr. Darussalam Syamsuddin, M.Ag
NIP. 19821016 199003

Tembusan :
Yth. Rektor UIN Alauddin Makassar di Samata – Gowa;
(Sebagai Laporan);



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Kampus II : Jl. H. M. Yasin Limpo No. 36 Samata Sungguminasa – Gowa Telp. 841879 Fax 8221400

KEPUTUSAN
DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM UIN ALAUDDIN MAKASSAR
Nomor 216/Tahun 2017
TENTANG
PANITIA DAN PENGUJI UJIAN MUNAQASYAH/SKRIPSI
TAHUN 2017

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar setelah :

- Membaca** : Surat Permohonan :
Nama : Nur Aulia Sari
NIM : 10500113229
Jurusan : Ilmu Hukum (IH)
Hari/Tanggal : Rabu, 6 Desember 2017
Perihal : Ujian Munaqasyah/Skripsi
Judul : "Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Sanksi Pidana Pada Kejahatan Narkotika (Studi Putusan Pengadilan Negeri Polewali No. 186/Pid.Sus/2016/PN.Pol)"
- Menimbang** : a. Bahwa mahasiswa tersebut di atas telah memenuhi persyaratan dan ketentuan Ujian Munaqasyah/Skripsi;
b. Bahwa dengan terpenuhinya persyaratan dan ketentuan di atas, maka perlu ditunjuk Panitia dan Dosen Penguji;
c. Bahwa mereka yang tersebut namanya pada lampiran Surat Keputusan ini dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk diserahi tugas melaksanakan kegiatan dimaksud.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah 04 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
3. Keputusan Menteri Agama RI, Nomor 289 Tahun 1993 Jo Nomor 202 B Tahun 1998 tentang Pemberian Kuasa dan Wewenang Manandatangani Surat Keputusan;
4. Keputusan Menteri Agama RI, Nomor 20 Tahun 2014 tentang Statuta UIN Alauddin Makassar;
5. Peraturan Menteri Agama RI, Nomor 25 Tahun 2013 Junto Peraturan Menteri Agama RI No. 85 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN Alauddin Makassar;
6. Keputusan UIN Rektor UIN Alauddin Makassar Nomor 200 Tahun 2016 tentang Pedoman Edukasi UIN Alauddin Makassar.
- MEMUTUSKAN**
- Menetapkan** :
Pertama : Membentuk Panitia dan Penguji Ujian Munaqasyah/Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar dengan komposisi sebagai berikut :
Ketua : Prof. Dr. Darussalam Syamsuddin, M.Ag
Sekretaris : Dr. H. Muh. Saleh Ridwan, M.Ag
Penguji I : Dr. Jumadi, M.H.
Penguji II : Rahman Syamsuddin, S.H., M.H.
Pelaksana : 1. Drs. Ikshan Zainuddin, M.M
2. Andriyanto, S.E
- Ketiga** : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya Surat Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran DIPA/APBN/PNBP UIN Alauddin Makassar Tahun 2017;
- Keempat** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkannya dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan di dalamnya akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Keputusan ini disampaikan kepada masing-masing yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.



Ditetapkan di : Samata-Gowa
Pada tanggal : 5 Desember 2017
Dekan

Prof. Dr. Darussalam Syamsuddin, M.Ag
NIP. 19621016 199003 1 003

Tembusan:
Yth. Rektor UIN Alauddin Makassar di Samata – Gowa
(Sebagai Laporan)



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

ALAUDDIN

Kampus II : Jl. H. M. Yasin Limpo No. 36 Samata Sungguminasa – Gowa Telp. 841879 Fax 8221400

Nomor : B-4366/SH.01/PP.00.9/12/2017
Sifat : Penting
Lamp : -
Hal : **UNDANGAN UJIAN MUNAQASYAH**

Samata, 5 Desember 2017

Kepada.

- Yth.
1. Prof. Dr. Darussalam Syamsuddin, M.Ag (Ketua)
 2. Dr. H. Muh. Saleh Ridwan, M.Ag (Sekertaris)
 3. Dr. Jumadi, M.H (Penguji I)
 4. Rahman Syamsuddin, S.H., M.H (Penguji II)
 5. Dr. Hamsir, M.Hum (Pembimbing I)
 6. Dra. Nila Sastrawati, M.Si (Pembimbing II)
 7. Pelaksana

Di-
Makassar

Assalamu 'Alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat, disampaikan bahwa Ujian Munaqasyah atas nama :

Nama : Nur Aulia Sari
N I M : 10500113229
Jurusan : Ilmu Hukum

Untuk maksud tersebut, maka kami mengundang Saudara(i) Untuk Menghadiri Ujian Munaqasyah, Insya Allah dilaksanakan pada :

Hari/Tanggal : Rabu, 6 Desember 2017
Buka Sidang : 08.30 WITA
Waktu : Pukul 10.00 – 11.00 WITA
Tempat : Ruang Ujian Munaqasyah

Atas perhatian dan kehadirannya diucapkan terima kasih.

Wassalam
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
MAKASSAR

Prof. Dr. Darussalam Syamsuddin, M.Ag
NIP. 19621016 199003 1 003

Tembusan:

Yth. Rektor UIN Alauddin Makassar di Samata – Gowa
(Sebagai Lapcran)